



LAPORAN TAHUNAN
**DIREKTORAT JENDERAL
POTENSI PERTAHANAN**
KEMENTERIAN PERTAHANAN
TA 2022





LAPORAN TAHUNAN
**DIREKTORAT JENDERAL
POTENSI PERTAHANAN**
KEMENTERIAN PERTAHANAN
TA 2022



Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan TA 2022

Editor :

- Mayjen TNI Dadang Hendrayudha, Dirjen Potan Kemhan
- Laksma TNI Sri Yanto, S.T., Ses Ditjen Potan Kemhan

Tim Penyusun :

- Brigjen TNI Dani Suropto, S.I.P., M.Si., Dirvet Ditjen Potan Kemhan
- Brigjen TNI Fahrid Amran, S.H., Dirsumdahan Ditjen Potan Kemhan
- Brigjen TNI Sarwono, B.Sc., S.I.P., PSC., Dir Bela Negara Ditjen Potan Kemhan
- Marsma TNI Ir. Wajariman, M.Sc., Dirtekindhan Ditjen Potan Kemhan

Fotografi :

Rahmat Hidayat

Desain Grafis :

Daniel Saroha

Tim Redaksi :

- Kolonel Sus Muhamad Ridwan, S.Pd., M.Pd. Kabag Datin Setditjen Potan Kemhan
- Kolonel Arh Edy Endrayana Kasubdit Minvet Ditvet Ditjen Potan Kemhan
- Dra. Marwitri. M.M(Han) Kasubdit Sarpras Ditsumdahan Ditjen Potan Kemhan
- Dr. S.R.M. Indah Permata Kasubdit Lingja Dit Bela Negara Ditjen Potan Kemhan
- Kolonel Laut (T) Anis Rusdiyono, S.T., M.M. Kasubdit TIK Dittekindhan Ditjen Potan Kemhan
- Much Sarif Hidayat, S.Ag Kasubbag Doksiptaka Bag Datin Setditjen Potan Kemhan
- Giri Satriyo Adi Saputro, S.E. Kasubbag Minpeg Bagum Setditjen Potan Kemhan
- Ansar Tutu, S.E. Kasubbag TU Set Bagum Setditjen Potan Kemhan
- Tri Yulia Lestari, S.E. Kasubbag TU Ditvet Ditjen Potan Kemhan
- Sundari, S.Sos., M.M. Kasubbag TU Ditsumdahan Ditjen Potan Kemhan
- Indah Rosarina, S.Psi., M.Si. Kasubbag TU Dit Bela Negara Ditjen Potan Kemhan
- Djaliemer Asmer Sinaga, S.Sos., M.Si. Kasubbag TU Dittekindhan Ditjen Potan Kemhan



Alamat Redaksi :

Bagdatin Setditjen Potan Kemhan
Gedung R. Suprpto
Jl. Tanah Abang Timur No.8
Jakarta Pusat 10110



L A P O R A N T A H U N A N
**DIREKTORAT JENDERAL
POTENSI PERTAHANAN**
K E M E N T E R I A N P E R T A H A N A N
TA 2022

Sambutan



Salam Bela Negara!

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karuniaNya Ditjen Pothan Kemhan telah menyelesaikan pembuatan Buku Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI TA. 2022. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Potensi Pertahanan, meliputi sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi industri pertahanan, dan teknologi informasi komunikasi pertahanan terkait tugas yang diberikan. Pencapaian periode kerja 2020-2022 merupakan hasil pelaksanaan program sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Buku laporan Tahunan ini di samping sebagai bentuk pertanggungjawaban juga diharapkan dapat dijadikan referensi dan tambahan literasi bagi pegawai di jajaran Kementerian Pertahanan dan khususnya bagi pegawai Ditjen Pothan Kemhan.

Penyelenggaraan pertahanan negara berpedoman pada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dalam menghadapi ancaman militer, hibrida dan non militer. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida

menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman non militer, Kementerian/Lembaga diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama didukung oleh kekuatan bangsa lainnya sebagai unsur pendukung. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 30 ayat (2), kesemestaan menunjukkan bahwa upaya mempertahankan negara melibatkan seluruh sumber daya nasional, baik warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan maupun sarana dan prasarana. Dalam konteks inilah Ditjen Pothan menjalankan tugas dan fungsinya, dimana seluruh potensi pertahanan ditransformasikan menjadi kekuatan nyata pertahanan Indonesia.

Melalui Buku Laporan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian Buku Laporan Tahunan Ditjen Pothan Kemhan Tahun 2020-2022. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Keluarga Besar Ditjen Pothan yang telah menjadi sebuah Team Work yang solid dan kuat, sehingga capaian Ditjen Pothan Kemhan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 2022

Dirjen Pothan Kemhan RI

Dadang Hendrayudha
Mayor Jenderal TNI

DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN



Ringkasan Eksekutif

Ditjen Potan Kemhan RI mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Potensi Pertahanan, meliputi sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi industri pertahanan, dan teknologi Informasi komunikasi pertahanan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka Ditjen Potan Kemhan RI melaksanakan 5 (Lima) kegiatan yaitu : Pembinaan Keveteranan, Pembinaan Sumber Daya Pertahanan, Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan, yang didukung oleh Pelayanan Teknis dan Administratif. Capaian tahun 2022 dengan serapan anggaran sebesar 99,40%.

Veteran merupakan salah satu potensi pertahanan nonmiliter yang dimiliki oleh Indonesia. Hingga tahun 2022, jumlah veteran RI yang tercatat sebanyak 328.383 orang. Direktorat Veteran (Ditvet) menjalankan fungsinya sebagai administrator keveteteranan dan bekerja sama dengan LVRI, Babinminvetcatdam, Ditwatpersal, Ditwatpersau, Rowatpers SDM Polri serta PT. Taspen dalam melayani Veteran RI. Tahun 2020 ditandai dengan diluncurkannya aplikasi VETERAN yang sudah tersedia di Playstore. Aplikasi ini merupakan media pendaftaran Calon Veteran secara on-line. Ditvet secara terus menerus melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait UU No.



15 Tahun 2012 tentang Veteran RI. Sosialisasi dilakukan secara Langsung maupun melalui media televisi dan radio.

UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara menjadi landasan gerak atau payung hukum untuk menerbitkan peraturan dibawahnya, sampai dengan periode Tahun 2022 telah diterbitkan beberapa peraturan yaitu :

1. Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN Haneg.

2. Pengesahan Permenhan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan dan Pembinaan Komcad.
3. Pengesahan Permenhan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kurikulum Latsarmil Komcad.
4. Pengesahan Permenhan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyiapan Komduk.



5. Pengesahan Permenhan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelatihan Penyegaran Komcad.
6. Pengesahan Permenhan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan terhadap Warga Negara yang berperan aktif dan berjasa dalam Komcad

Ditjen Potan Kemhan pada Tahun 2021 telah mencatat sejarah baru dalam Pertahanan negara, yaitu ditetapkannya Komponen Cadangan oleh Presiden RI dan sampai dengan Tahun 2022 telah

berhasil menetapkan sebanyak 6.076 Komponen Cadangan. Ditjen Potan Kemhan berhasil membentuk Komponen Pendukung Kesehatan sebanyak 679 orang yang menjadi relawan dalam penanganan Covid-19 di RS. dr. Suyoto.

Dengan disahkannya UU PSDN memberi landasan lebih kuat bagi Kementerian Pertahanan sebagai leading sektor Bela Negara. Sampai dengan Tahun 2022, beberapa Peraturan turunan UU PSDN yang terkait Bela Negara telah berhasil diterbitkan, yaitu:

1. Perpres nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara
2. Peraturan Menteri Pertahanan nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
3. Peraturan Menteri Pertahanan nomor 9 Tahun 2022 tentang Kader Bela Negara dan Fasilitator Bela Negara.

Selain regulasi, untuk sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara,

Kementerian Pertahanan membuat kerjasama dengan berbagai Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah maupun Organisasi Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kesepakatan bersama antara Kementerian Pertahanan dengan 13 Kementerian/Lembaga tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara
2. Perjanjian Kerjasama Antara Ditjen Potan Kemhan Dengan Fisip Unila
3. Perjanjian Kerjasama Antara Ditjen Potan Kemhan Dengan LLDIKTI

Ditjen Potan Kemhan melakukan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan berbagai inovasi, melalui televisi, radio, media sosial maupun melalui Rembuk Nasional dan Ngopi Daring Bela Negara. Fungsi sebagai leading sektor diperankan dengan menyelenggarakan Rakor dengan Kementerian/Lembaga, Lemdik TNI, dan dengan Perguruan Tinggi, serta menyusun Modul PKBN yang menjadi panduan bagi seluruh *stakeholder* dalam menyebarkan nilai-nilai Bela Negara.

Dalam bidang Teknologi dan Industri Pertahanan pada Tahun 2021 telah mencatat prestasi baru dalam layanan pendaftaran dan penetapan industri pertahanan yaitu diluncurkannya Sistem Online untuk Pendaftaran Industri Pertahanan, Ekspor dan Impor Alpalhankam serta

Badan Usaha Bahan Peledak. Sistem Online tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan. Dengan sistem online pemohon lebih mudah melakukan registrasi ataupun mendapatkan informasi/data kegiatan lain yang dapat dipantau proses kemajuannya secara online. Sistem Pendaftaran ini dapat diakses melalui aplikasi telepon genggam berbasis iOS dan Android. Dengan adanya pendaftaran sistem online dampaknya luar biasa, terbukti sampai dengan Oktober 2022 Kementerian Pertahanan RI telah menetapkan 211 Industri baik BUMN maupun BUMS sebagai Industri Pertahanan. Untuk mempromosikan produk industri pertahanan dan membangun kerjasama Internasional, Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) bekerja sama dengan PT. Napindo Media Ashatama menyelenggarakan Pameran Industri Pertahanan terbesar se-Asia Tenggara *Indo Defence 2022 Expo & Forum* yang digelar di tiga lokasi secara bersamaan, di JIExpo Kemayoran sebagai pusat aktivitas, kemudian di Pangkalan TNI AL Pondok Dayung dan Apron Selatan Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, mulai tanggal 2 s.d. 5 November 2022, dengan tema *"Peace, Prosperity, Strong Defence"*.







Daftar Isi

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL POTENSI PERTAHANAN	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
DAFTAR ISI	10
VISI, MISI, AGENDA PRIORITAS PEMERINTAH 2019-2024	12
Sistem Pertahanan Negara	
Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2022 -2024	
Kebijakan pertahanan Negara 2022	
Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan	
PELAYANAN TEKNIS & ADMINISTRATIF	25
Sekretariat Direktorat	
Anggaran & Realisasi	
Nilai BMN Milik Ditjen Potan	
Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Sistem Informasi Potensi Pertahanan	
PEMBINAAN KEVETERANAN	38
Direktorat Veteran	
Definisi dan Penggolongan Veteran RI	
Peningkatan Kualitas Layanan Veteran	
Tunjangan Veteran	
Sosialisasi Layanan dan Aturan Keveteranan	
Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia	
Peningkatan Kualitas Layanan Publik Terkait Veteran	
Koordinasi Antar Lembaga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Veteran	



DIREKTORAT SUMBER DAYA PERTAHANAN 46

Direktorat Sumber Daya Pertahanan

Regulasi dan Kebijakan Ditsumdahan Periode 2020-2022

Komponen Pendukung

Komponen Pendukung Bidang Kesehatan

Sosialisasi UU PSDN Bidang Komponen Pendukung

Komponen Cadangan

DIREKTORAT BELA NEGARA..... 71

Direktorat Bela Negara

Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Regulasi Bela Negara

Sosialisasi Bela Negara

Kegiatan Bela Negara di Lingkungan Pendidikan

Kegiatan Bela Negara di Lingkungan Pemukiman

Kegiatan Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan

DIREKTORAT TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN 107

Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan

Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan

Implementasi Kebijakan Kandungan Lokal, Offset dan Alih Teknologi

Peningkatan Kerjasama Internasional

Perizinan Industri dan Badan Usaha Bahan Peledak (BU Handak)

Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan (Bangtekindhan)

PENUTUP 133

1

VISI, MISI, dan AGENDA Prioritas Pemerintah 2019 – 2024



5 ARAHAN UTAMA PRESIDEN

Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

1

Membangun SDM pekerja keras yang **dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi** didukung dengan kerjasama industri dari talenta global.

2

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata. **mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.**

3

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law terutama menerbitkan 2 undang-undang. **Pertama UU Cipta Lapangan Kerja.** Kedua UU pemberdayaan UMKM.

4

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5

Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa **demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memformulasikan visi pembangunan nasional untuk tahun 2019 - 2024 adalah :

***“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU
YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN
BERDASARKAN GOTONG ROYONG”***

1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Setelah tahapan besar percepatan pembangunan infrastruktur, tahapan besar berikutnya fokus pada investasi peningkatan kualitas manusia Indonesia yang maju, unggul, dan sejahtera.

2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

Percepatan pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural telah membuka jalan bagi terbangunnya fondasi struktur perekonomian yang lebih kuat dan berdaya saing. Dengan fondasi tersebut, kita akan teruskan dengan upaya membuat perekonomian menjadi lebih kokoh, produktif, mandiri, dan berdaya saing sehingga mampu membuka lebih banyak lagi lapangan kerja, menekan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan adalah janji kemerdekaan yang harus dituntaskan. Pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,82 persen pada Maret 2018. Begitu pula dengan kesenjangan pendapatan antarwarga terus ditekan sehingga mencapai Rasio Ginisebesar 0,389. Upaya memperkecil ketimpangan antardaerah juga menjadi fokus perhatian pemerintah.

4 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Pembangunan ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan hidup agar pembangunan menjadi berkelanjutan.

5

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

Negara berkewajiban untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Manusia Indonesia yang ingin kita bangun bukan hanya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing, tapi juga manusia Indonesia yang berkarakter dan memiliki kepribadian bangsa sesuai dengan Pancasila, berakhlak mulia, dan memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika.

6

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Sebagai negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum serta Negara harus hadir memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga negara dan HAM, termasuk rasa aman kepada seluruh warga negara.

7

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

Sebagai negara yang berdaulat, Negara wajib ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

8

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Salah satu karakteristik negara maju adalah memiliki demokrasi yang sehat serta birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, diperlukan aktualisasi demokrasi Pancasila serta reformasi birokrasi dan tata kelola secara berkelanjutan.

9

Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah perlu ditata kembali hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Berlandaskan UUD 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, disusunlah RPJMN 2015-2019 (Perpres No.2/2015) sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

RPJMN 2019-2024 tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ditetapkan setiap tahunnya.

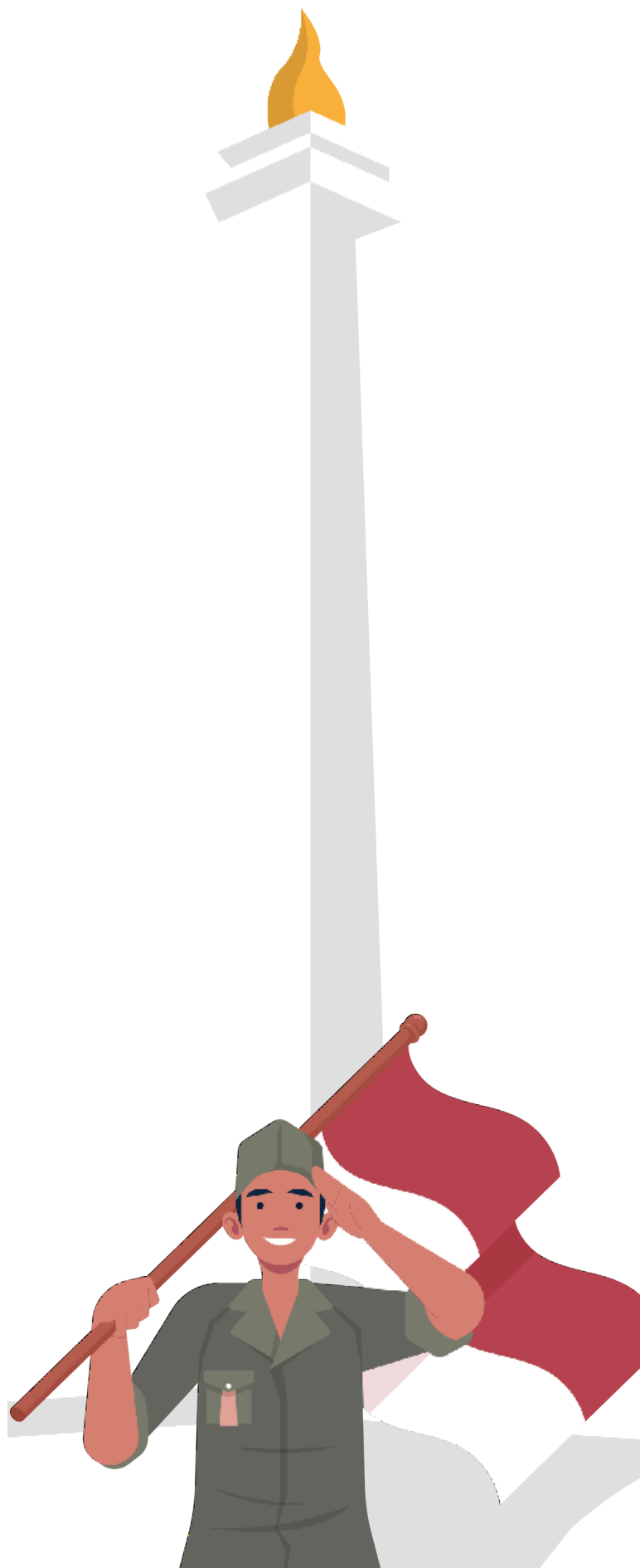
1.1 Sistem Pertahanan Negara

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sistem Pertahanan Negara melibatkan seluruh komponen, yang terdiri dari Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Sesuai dengan UUD 1945 setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyatakan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Implementasi dari sistem pertahanan negara diselenggarakan melalui pengintegrasian pertahanan keamanan rakyat militer dan pertahanan keamanan rakyat nonmiliter sebagai bentuk kesemestaan (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta / SISHANKAMRATA). Pengintegrasian dilaksanakan dalam wujud keterpaduan penyelenggaraan pertahanan militer (Komponen Utama/TNI, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung) dan Pertahanan Nonmiliter (Unsur Utama dan Unsur-Unsur Lain kekuatan bangsa) sesuai ancaman yang dihadapi dalam rangka menciptakan keamanan nasional.



1.2

Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020 - 2024

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara melalui :

- implementasi sistem pertahanan negara pada kekuatan darat, laut, dan udara dengan merealisasikan pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung;
- pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar;
- penerapan akuntabilitas, transparansi, dan bebas korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan;
- pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional;
- revitalisasi industri pertahanan sebagai produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara;
- peningkatan kerja sama internasional di bidang pertahanan dan keterlibatan dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya dalam rangka ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia; dan
- peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.



1.3

Kebijakan Pertahanan Negara 2022

Sesuai UU No. 3/2002, Pertahanan Negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman. Hal ini merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang dilakukan guna mewujudkan suatu kesatuan pertahanan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Dalam Kebijakan Pertahanan Negara 2022 bahwa pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan, dan upaya untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara. Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang berlaku 5 (lima) tahun menjadi acuan bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara

Nasional Indonesia (TNI) untuk menyelenggarakan pertahanan negara. Dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara tiap-tiap tahunnya, Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan pertahanan negara.

Kebijakan pertahanan negara tahun 2022 merupakan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari upaya pencapaian sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan pertahanan negara tahun 2021. Sasaran kebijakan yang masih berlangsung akan dilanjutkan, diantaranya kebijakan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung, kebijakan pembangunan postur TNI, perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar, pembangunan sistem logistik yang terdesentralisasi, dan penguatan pertahanan di wilayah selat-selat strategis. Namun, seiring dengan prediksi munculnya berbagai ancaman sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis, beberapa sasaran kebijakan mengalami perubahan.

Dinamika Ancaman

Dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, maupun nasional sangat kompleks dan multidimensional. Perubahan ini memunculkan berbagai bentuk ancaman, yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan ancaman aktual dan potensial, yang dikelompokkan sebagai berikut:

a. Ancaman Aktual

Ancaman aktual merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri antara lain: wabah penyakit/pandemi (Covid-19) dan dampak yang ditimbulkan, konflik Laut Cina Selatan, merosotnya pertumbuhan ekonomi, pelanggaran wilayah perbatasan/ intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan dan penyanderaan WNI, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, ancaman intelijen atau spionase, ancaman perang psikologikal, serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan dan pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, imigran asing, serta dampak lahirnya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 yang ditandai dengan kondisi mudah bergejolak (volatility), muncul ketidakpastian (uncertainty) disana-sini, kompleksitas (complexity) persoalan, serta ketidakjelasan (ambiguity) atas situasi yang berkembang.

b. Ancaman Potensial

Ancaman potensial merupakan ancaman yang belum terjadi, tetapi sewaktu-waktu dapat terjadi dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual. Ancaman tersebut diantaranya berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), kelangkaan pangan, energi, sumber daya air, kesehatan, dan ancaman senjata nuklir.



1.4 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

Berdasarkan Permenhan No. 14 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Ditjen Potan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Potensi Pertahanan.

Dirjen Potan Kemhan RI



Mayjen TNI Dadang Hendrayudha
(Okt 2020 sd sekarang)



DITJEN POTHAN MELAKSANAKAN FUNGSI SEBAGAI BERIKUT :



1

Perumusan kebijakan di bidang potensi pertahanan, meliputi sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi industri pertahanan dan teknologi informasi komunikasi pertahanan.



2

Pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan meliputi sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi industri pertahanan dan teknologi informasi komunikasi pertahanan.



3

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang potensi pertahanan meliputi sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi industri pertahanan dan teknologi informasi komunikasi pertahanan.



4

Pelaksanaan administrasi Ditjen Potan.



5

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.



Penekanan

Dalam rangka mendukung kebijakan pertahanan negara Tahun 2022 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A** Pastikan terlaksananya modernisasi Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan operasional dan daya tangkal strategis serta mobilitas tinggi.
- B** Wujudkan pertahanan pulau-pulau besar melalui penguatan kompartemen strategis pertahanan dan penguatan selat-selat strategis sesuai dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia.
- C** Perkuat diplomasi dan kerja sama internasional dalam rangka membangun rasa saling percaya antar bangsa, menangkal internasionalisasi isu-isu Papua dan Aceh.
- D** Wujudkan penguatan fasilitas kesehatan dan farmasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta antisipasi pandemi kedepan.
- E** Wujudkan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi dalam rangka memperkuat komponen utama.
- F** Wujudkan penyiapan logistik melalui sinergitas dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
- G** Pastikan penggunaan produksi Industri Pertahanan Dalam Negeri dan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Luar Negeri harus memperhatikan persyaratan *Offset dan Transfer of Technology*.
- H** Menerapkan prinsip manajerial yang benar dalam pengelolaan anggaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara.
- I** Hindari penyalahgunaan kewenangan jabatan yang berakibat terjadinya kerusakan dalam penyelenggaraan sistem organisasi.



STRUKTUR ORGANISASI
**DIREKTORAT JENDERAL
POTENSI PERTAHANAN**
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI



Mayjen TNI Dadang Hendrayudha

DIREKTUR JENDERAL POTENSI PERTAHANAN



Brigjen TNI Sarwono

DIREKTUR BELA NEGARA



**Kol Adm Amiruddin
Laupe, S.Sos., M.M.**

KASUBDIT
LINGKUNGAN
PEMUKIMAN



**Kol Mar Rahmat
Junaedi**

KASUBDIT
LINGKUNGAN
PENDIDIKAN



**Dr. SRM. Indah
Permata**

KASUBDIT
LINGKUNGAN
PEKERJAAN



Brigjen TNI Fahrid Amran, S.H.

DIREKTUR SUMBER DAYA
PERTAHANAN



**Kol Arm Rudi
Setiawan, S. IP.**

KASUBDIT PERENCANAAN
& PENYEDIAAN
KOMPONEN CADANGAN



**Kol Kav Ferry
Firmansyah, S.H.**

KASUBDIT PEMBENTUKAN
& PEMBINAAN KOMPONEN
CADANGAN



**Kol Lek Dewa Gede
Agung Putra, S.T.**

KASUBDIT SUMBER DAYA
MANUSIA PENDUKUNG
PERTAHANAN



Kol Inf Subarda T, S.I.P

KASUBDIT SUMBER DAYA
ALAM DAN BUATAN
PENDUKUNG PERTAHANAN



**Pembina Tk. I IV/b
Dra. Marwitri, M.MHan**

KASUBDIT SARANA
PRASARANA PENDUKUNG
PERTAHANAN





Laksma TNI Sri Yanto, S.T.

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL POTENSI
PERTAHANAN



Marsma TNI Ir. Wajariman, M.Sc.

DIREKTUR TEKNOLOGI
DAN INDUSTRI PERTAHANAN



Brigjen TNI Dani Satripto, S.IP., M.Si.

DIREKTUR VETERAN



**Kol Laut (T) Anis
Rusdiyono, S.T., M.M.**

TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
PERTAHANAN



**Kol Arh Edy
Endrayana**

KASUBDIT
ADMINISTRASI



**Kol Arm Darmawan
Budi Yuwono, S. IP.**

KABAG PROGRAM
DAN LAPORAN



**Kol Arh Imanuel
Pasaribu, S. IP, M. Si.**

KASUBDIT INDUSTRI
PERTAHANAN



**Kol Arh Eko Juni
Kamtano, SE.**

KASUBDIT
KOMUNIKASI
SOSIAL



**Kol Arh Heri
Siswanto, S.Sos., M.M.**

KABAG UMUM



Kol Czi Iim Nurohim

KASUBDIT PERIZINAN



**Kol Arh Eko Wibowo
Kusrianto, SE.**

KASUBDIT DATA



**Kol Sus Muhamad
Ridwan, S. Pd, M. Pd.**

KABAG DATA
INFORMASI



**Kol Tek Dedy
Laksmo, S.E., S.T., M.M.**

KASUBDIT IMBAL
DAGANG KANDUNGAN
LOKAL DAN OFFSET



**Kol Kav Syafrudin
Iskandar, S.I.P.**

KASUBDIT PROMOSI
DAN KERJASAMA





PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF



2 Sekretariat Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

Sekretariat Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan yang selanjutnya disebut Setditjen Potan adalah pembantu Direktorat Jenderal yang dipimpin Sekretaris Jenderal disebut Sesditjen dengan tugas melaksanakan koordinasi kegiatan, dukungan pelayanan teknis dan administrasi Direktorat Jenderal. Dalam kurun waktu 2021-2022 Setditjen Potan telah mengalami pergantian pimpinan yaitu:

Setditjen terdiri atas:

- Bagian Program dan Laporan,
- Bagian Data Informasi,
- Bagian Umum; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional



Brigjen TNI Aribowo Teguh Santoso, S.T., M.Sc.
(Des 2018 sd Des 2021)



Laksma TNI Sri Yanto, S.T.
(Des 2021 sd sekarang)

Dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen melaksanakan fungsi:

- Pengkoordinasian kegiatan Ditjen
- Pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja dan anggaran, serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumah tanggaan, serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen.
- Pengelolaan administrasi keuangan Ditjen.
- Pengelolaan data dan informasi, kepastakaan serta pelaporan sistem informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Ditjen.

2.1 Anggaran dan Realisasi

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mengelola dua program yaitu:

- Program Potensi Pertahanan dengan melaksanakan 5 (lima) kegiatan dalam rangka perumusan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pertahanan non militer serta pembentukan Komponen Cadangan.
- Program pengembangan teknologi dan industri pertahanan (Bangtekindhan) meliputi Pemberdayaan Industri Pertahanan, Pembuatan Struktur Dan Monitoring Pelaksanaan Kandungan Lokal dan Ofset, Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Perundang Undangan yaitu Permenhan No.5 Tahun 2021, Monitoring Perijinan Ekspor dan Impor Alpalhankam serta Harmonisasi Peraturan Menteri Pertahanan Tentang Satu Data Pertahanan

Rekap Pagu dan Realisasi

Rekap Pagu dan Realisasi 2020



T.A. / SUB SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	PERSENTASE
TA. 2020	222,913,515,000	217,832,562,747	5,080,952,253	97.72%
Dit Bela Negara	10,543,449,000	10,364,558,600	178,890,400	98.30%
Dit Veteran	5,019,748,000	4,984,822,353	34,925,647	99.30%
Dit Sumdahan	26,072,654,000	25,955,019,810	117,634,190	99.55%
Dittekindhan	119,659,234,000	119,562,010,110	97,223,890	99.92%
Setditjen	61,618,430,000	56,966,151,874	4,652,278,126	92.45%

Rekap Pagu dan Realisasi 2021



T.A. / SUB SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	PERSENTASE
TA. 2021	325,207,977,000	321,826,612,117	3,381,364,883	98.96%
Dit Bela Negara	23,871,196,000	23,289,557,996	581,638,004	97.56%
Dit Veteran	5,337,266,000	5,283,596,787	53,669,213	98.99%
Dit Sumdahan	156,305,587,000	156,025,780,907	279,806,093	99.82%
Dittekindhan	34,718,695,000	34,599,863,580	118,831,420	99.66%
Setditjen	104,975,233,000	102,627,812,847	2,347,420,153	97.76%

Rekap Pagu dan Realisasi 2022



T.A. / SUB SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	PERSENTASE
TA. 2022	361,300,573,000	359,157,969,648	2,142,603,352	99,40%
Dit Bela Negara	18,008,207,000	17,924,344,047	195,985,101	99,53%
Dit Veteran	7,000,477,000	6,804,491,899	53,669,213	97,20%
Dit Sumdahan	125,863,704,000	125,297,601,547	566,102,453	99,55%
Dittekindhan	132,473,200,000	132,446,029,368	27,170,632	99,98%
Setditjen	77,954,985,000	76,685,502,787	1,269,482,213	98,37%

2.2 Nilai BMN Milik Ditjen Pothan

1. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Tahun Anggaran 2020

Tanggal : 31-12-2022

Halaman : 1

Kode Lap. : LPA PKT

NAMA UAKPB : 012.01.01.683841.000 DITJEN POTHAN KEMHAN

KODE	AKUN NERACA	JUMLAH
117111	Barang Konsumsi	0
11712	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	0
132111	Peralatan dan Mesin	377,162,714,529
133111	Gedung dan Bangunan	0
134111	Jalan dan Jembatan	9,765,000,000
134113	Jaringan	1,274,352,640
135121	Aset Tetap Lainnya	189,313,600
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	131,716,926,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(174,953,740,348)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(683,550,000)

KODE	AKUN NERACA	JUMLAH
13731	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(148,674,477)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(85,177,400)
162151	Software	16,411,981,710
162161	Lisensi	7,914,632,000
162171	Hasil Kajian/Penelitian	48,466,821,528
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	251,223,034,991
16931	Akumulasi Amortisasi software	(10,796,036,085)
16931	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(4,155,181,805)
	JUMLAH	653,302,416,883

2. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 Tahun Anggaran 2021

UAPB : 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN
UAKPB : 683841 DITJEN POTHAN KEMHAN

Tanggal : 20/12/22 10:40 PM
Halaman : 1
Kode Lap. : ap_hmr_neraca_barang_k3_sat

KODE	AKUN NERACA	JUMLAH
132111	Peralatan dan Mesin	408,394,151,164
133111	Gedung dan Bangunan	6,222,609,812
134111	Jalan dan Jembatan	9,765,000,000
134113	Jaringan	15,770,000
135121	Aset Tetap Lainnya	189,313,600
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	106,087,726,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(180,733,947,336)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(80,838,098)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(878,850,000)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(197,125)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(85,177,400)

KODE	AKUN NERACA	JUMLAH
	Software	20,601,661,710
	Lisensi	7,914,632,000
	Hasil Kajian/Penelitian	363,796,440,959
	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,383,980,000
	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	32,723,880,000
	Akumulasi Amortisasi Software	(14,365,482,960)
	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(4,990,615,182)
	JUMLAH	755,960,057,144

3. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember 2022 Tahun Anggaran 2022

UAKPB : 012.01.0100.683841 DITJEN POTHAN KEMHAN

Tanggal : 21-12-2022

Halaman : 1

Kode Lap. : L RNST

KODE	AKUN NERACA	JUMLAH
132111	Peralatan dan Mesin	398,430,265,333
133111	Gedung dan Bangunan	2,000,788,812
134111	Jalan dan Jembatan	9,765,000,000
135121	Aset Tetap Lainnya	189,313,600
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	106,087,726,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(185,357,165,855)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(58,627,776)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(976,500,000)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(85,177,400)
162151	Software	20,601,661,710
162161	Lisensi	7,914,632,000

KODE	AKUN NERACA	JUMLAH
162171	Hasil Kajian/Penelitian	360,136,490,959
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,383,980,000
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	32,723,880,000
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(16,150,206,398)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(5,408,331,869)
	JUMLAH	731,197,729,116

2.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menaruh perhatian khusus pada pengembangan SDM sebagai salah satu pilar utama organisasi. Untuk itu, dalam kurun waktu 2020 - 2022 dilakukan peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM melalui pelatihan terstruktur dan berkelanjutan, antara lain :

Daftar nama anggota yang mengikuti dik/kursus lebih dari satu dirinci menjadi :

I. Tahun 2020

1. Training of Fasilitator (TOF) Diklat Kader Bela Negara TA. 2020 :

- Letkol Arh Heri Siswanto S.Sos., M.M.

2. Sus Katjemen Hanneg untuk Eksekutif Kepemimpinan TA. 2020 :

- Pembina Tk.I IV/b Aing Salamul Bakir S.Sos., M.M.Han

3. Ujian Dinas Tk.I PNS U.O. Kemhan TA 2020:

- Pengatur Tk.I II/d Hendrawan

4. Diklat Kader Pembina Bela Negara Tk. Pertama bagi PNS Kemhan TA. 2020 :

- Henry Arifin, A.Md,
- Iwan Munadnan, S.Hum, dan
- Rizky Sony Nugroho, S.I.Pust

5. Pelatihan Pratugas Satgas (Pre Deployment Training) Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Konga XXIII-O Unifil Lebanon TA. 2020 :

- Serka Miftah Faridil Arifin



Diklat Kader Pembina Bela Negara TK. Pertama



Diklat Teknis Administrasi Umum Tk.II (Serda Turyono)

6. Diklat Teknis Alih Golongan dari Gol II ke Gol III gelombang IV bagi PNS Kemhan TA. 2020 :

- Pengatur Tk.I II/d F.Junita Manurung,
- Pengatur Tk.I II/d Ery Marsudi, dan
- Pengatur Tk.I II/d Yuli Mulyani

7. Peserta FGD :

- Pembina Tk.I IV/b Tri Rahayu Irianingsih, S.H., M.H.,
- Pembina Tk.I IV/b Akhmad Yumar Rifai, S.E., M.M., dan
- Pembina Tk.I IV/b Drs. Panca Mugi Priyatno, M.han.

8. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Kemhan TH. 2020 :

- Pembina Tk.I IV/b Ani Maryani, S.Pd., M.M.,
- Pembina IV/a Bangun Denny Kristiawan, S.E., M.M., dan
- Pembina IV/a R. Totok Yuswiyanto S.E., M.M.

9. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Kemhan TA. 2020:

- Penata III/c Sri Prita Linanda, S.Kom, M.Ap

10. Pembekalan Pelatihan Kerja TA. 2020 :

- Penata III/c Karunia Diah Ikawaty, B.Sc

11. Susjemen PBMN Han Angkatan VI TA. 2020 :

- Mayor Inf Soekmo Margo Wismandono, S.IP.,
- Penata III/c Dinne Andawiyah, S.Kom.

12. Diklat Teknis Alih Golongan dari Gol II ke Gol III gelombang II bagi PNS :

- Pengatur Tk.I II/d Sudiyono

13. Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) :

- Iwan Muhadnan, S.Hum,
- Untung Slamet, S.E.,
- Herdius Lesmana S.Sos, dan
- Novi Ariyanti, A.Md

14. Diklat Teknis Administrasi Umum Tk.II :

- Serda Turyono



Bimtek Pengendalian Intern Lap Keuangan (PIPK) (Pengatur Ilc Febriya Hasna Aini, A.Md)



Bimtek Pendampingan Konfigurasi e-Arsip Integrasi Srikandi (Penda Illa Rizky Sony Nugroho, S.I.Pust)



Diklat Kader Pembina Bela Negara

II. Tahun 2021

1. Bimbingan Teknis Pendampingan Konfigurasi e-Arsip Integrasi Srikandi :

- Penda III/a Rizky Sony Nugroho, S.I.Pust NIP 1991120022019031005

2. Diseminasi Hukum Humaniter dan HAM Dalam Situasi Konflik di Papua :

- Penata Tk.I III/d Charla Susanti, S.E. NIP 196910251990032001,
- Penata III/c Ade Tias Maulana, S.T. NIP 198712022010121004

3. Sertifikasi Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis Angkatan II Tahun 2021:

- Penda III/a Rizky Sony Nugroho, S.I.Pust NIP 1991120022019031005

4. Cyber Security Webinar Series:

- Letkol Cba Rustandi Wiramanggala NRP 11940010510371

5. Kegiatan Assesmen Center dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional APN:

- Pembina IV/b Dr. SRM. Indah Permatasari, S.T., M.M. NIP 197512312005012001,
- Pembina IV/a Suhardi, S.Sos, M.Si NIP 196708081990031001, dan
- Penata Tk.I III/d Charla Susanti, S.E. NIP 196910251990032001

6. Diklapi II Cab TNI AD TA. 2021:

- Kapten Cba (K) Ni Wayan Sukreni, S.Kom, M.M. NRP 11090012950882

7. Pembekalan Pelatihan Keterampilan Kerja TA. 2021 Bidang Agribisnis Pertanian Terpadu:

- Kolonel Laut (P) Mekky Mukarrom Santoso, S.M. NRP 10174/P,
- Kolonel Laut (KH/W) Dra Lily Limanovlave, M.Si NRP 12778/P,
- Kolonel Arh Luhkito Hadi Iswanto, S.T., M.Si (Han) NRP 33781, dan
- Pembina IV/a A. Yumar Rifai, S.E., M.Han NIP 196307051994031001

8. Diklat Kader Bela Negara PNS Kemhan Golongan I dan II TA. 2021:

- Pengatur II/c Aji Rachmat Dijaya, A.Md NIP 198807282019041001,
- Pengda TK. I II/b Syamsidar NIP 198110062006041001,
- Pengatur II/c Yunarsih NIP 197105021991102001, dan
- Pengda TK. I II/b Purwadi NIP 197805212006041001

9. Kursus Pengadaan Barang Dan Jasa Pertahanan Angkatan XXXIII TA. 2021:

- Penata III/c Andhika Nuswantara, S.T. NIP 19850331102010121005

10. Sesko AU :

- Mayor Tek Feby Trophydelta, S.T., M.M. NRP 528333



Diklat Pembekalan Pelatihan Keterampilan Kerja TA 2021 Kol Laut (KH/W) Dra Lily Limanovlave, M.Si



Diklat Kader BN PNS Kemhan TA. 2021 (Pengatur I/c Aji Rachmat Dijaya, A.Md)

III. Tahun 2022

1. Bimtek Pengendalian Intern Laporan Keuangan (PIPK) :

- Pembina IV/a Endang Susilowati N, S.E., M.M. NIP 197112292005012001,
- Pengatur II/c Febriya Hasna Aini, A.Md NIP 197702042020122011

2. Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kemhan dan BNPT Golongan III dan II Gelombang IV TA. 2022 :

- Pengatur II/c Shara Lutfianti Fraseto CPNS NIP 200004242022032003,
- Pengatur II/c Liza Femawati CPNS NIP 199002232022032004,
- Pengatur II/c Fadhillah Dessyana Putri CPNS NIP 199812022022032002,
- Pengatur II/c Dinayanti Farida CPNS NIP 199806292022022003, dan
- Pengatur II/c Muhammad Muis Ulinuha CPNS NIP 199308132022031001

3. Suskatjemen Aset BMN TA. 2022 :

- Penda Tk.I II/b Aris Doni Sulistiono, S.Sos, NIP 198204092003121001

4. Diklat Teknis Alih Golongan Dari Gol II Ke Gol III Gelombang III bagi PNS Kemhan TA. 2022 :

- Pengatur Tk.I II/d Ita Marta NIP 198408082006042001,
- Nina Suharyatmi NIP 198411262006042001

5. Diklat Teknis Multimedia Dan Desain Grafis TA. 2022 :

- Penda Tk.I III/b Adhy Nursaumi, S.Kom. NIP 197809152009122001

6. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Kemhan TA. 2022 :

- Pembina IV/a Dewi Sundari, S.E., M.Ak. NIP 197904102002122001

7. Peningkatan Keahlian Inspektur Kelaikan Laut Pertahanan Tk. II TA. 2022 :

- Letkol Laut (T) Donny Mangara Nainggolan, S.T., M.Tr (Opsla) NRP 14375/P,
- Letkol Laut (T) Kusni, S.T. NRP 13987/P, dan
- Letkol Laut (T) Mardiantoro NRP 12679/P



Pelatihan Informasi pengetahuan Pertahanan TA. 2022
(Serka (k) Wina Yunita)

8. Pelatihan Dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) Level-I Gel-I TA.2022 :

- Letkol Laut (KH) Oni Wiyono, S.Pd., M.Tr (Opsla) NRP 16272 /P,
- Letkol Laut (KH) Hani Kurniawan, S.Pd., M.M. NRP 16282/P

9. Pelatihan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) Level-I Gel-I TA. 2022 :

- Kolonel Laut (T) Andriawan Sitindaon, S.T., M.Han,
- Letkol Laut (KH) Erdison, S.Si., M.M.,
- Letkol Laut (KH) Oni Wiyono, S.Pd., M.Tr (Opsla),
- Letkol Laut (KH) Hani Kurniawan, S.Pd., M.M., dan
- Mayor Laut Fahmi Darajat, S.Kom., M.Si.

10. Pelatihan Informasi Pengetahuan Pertahanan (SIPP) :

- Serka (K) Wina Yunita

11. Suspim Jemen Han Angkatan XVII TA. 2022 :

- Pembina IV/a Dr. S.R.M. Indah Permatasari, S.T., M.M.

12. Suskat Jemen Hanneg untuk Eksekutif Kepemimpinan TA. 2022 :

- Pembina IV/a Totok Yuswiyanto, S.E., M.M.

13. Diklat Teknis Alih Golongan Dari Gol II ke Gol III Gelombang I dan II Bagi PNS Kemhan TA. 2022 :

- Pengatur Tk. I II/d Hendrawan,
- Pengatur Tk. I II/d Ita Marta Priatmi, dan
- Pengatur Tk. I II/d Nini Suharyatmi

14. Suskat Jemen Kepegawaian Kemhan TA. 2022 :

- Penata III/c Weni Yunanta, S.Sos.,
- Penata III/c Andhika kuswantara, S.T.

15. Kursus Penanggulangan Ekstrimisme Dalam Bahasa Melayu dari Arab Saudi :

- Kapten Cku Isdiyanto

16. Diklat Kader Bela Negara Tk.I bagi PNS U.O. Kemhan TA. 2022 :

- Penata III/c Ade Tias Maulana, S.T.,
- Penda Tk.I III/b Reni Octavia, S.A.P, dan
- Penda III/a Adhy Nursaumi, S.Kom.



Diklat Teknis Multimedia dan Desain Grafis TA. 2022
(Penda Tk.I IIIb Adhy Nursaumi, S.Kom.)



Suskat Jemen Kepegawaian Kemhan TA. 2022
(Penata IIIc Weni Yunanta, S.Sos.)



Diklat Teknis Alih Golongan II ke golongan III Gel.1&2
bagi PNS Kemhan TA 2022

2.5 Informasi Potensi Pertahanan

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik Ditjen Pothan telah melakukan sosialisasi dan publikasi kegiatan, peraturan-peraturan, pelayanan keveteteranan serta perizinan Alpalhankam dan bahan peledak melalui akun media sosial dari Ditjen Pothan.



Youtube Ditjen Pothan



- pothan.kemhan.go.id
- Kemhan.go.id/pothan



@dirjenpothan



Ditjen Pothan Kemhan RI



@ditjenpothan

Selain itu dalam Transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas dilakukan melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu, maka Ditjen Pothan Kemhan telah membangun beberapa Aplikasi antara lain Aplikasi E-Arsip, Aplikasi Sumber Daya Pertahanan yang di dalamnya meliputi Aplikasi Komcad dan Komduk, Aplikasi Veteran dan Aplikasi Perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen Pemerintahan

Aplikasi Veteran



Aplikasi Perizinan

<https://perizinan.kemhan.go.id/>



Aplikasi Komcad Komduk



Aplikasi E-ARSIP







DIREKTORAT
VETERAN



3

Direktorat Veteran

Direktorat Veteran selanjutnya disebut Dit Vet adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dipimpin oleh Direktur Veteran disebut Dir Vet mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang keveteranan Republik Indonesia. Dalam kurun waktu 2021-2022, Direktorat Veteran telah mengalami pergantian pimpinan yaitu ;



Brigjen TNI Haryadi, S.I.P.
(Agst 2019 sd Agst 2021)



Brigjen TNI Echsant Sutadji, S.Sos., M.M.
(Agustus 2021 sd Sept 2022)



Brigjen TNI Dani Suropto, S.I.P., M.Si.
(Sept 2022 sd sekarang)

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Veteran menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang keveteranan Republik Indonesia;
- Penyusunan peraturan di bidang keveteranan Republik Indonesia;
- Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang keveteranan Republik Indonesia;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang keveteranan Republik Indonesia; dan
- Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat

Direktorat Veteran terdiri dari :

- Subdirektorat Administrasi Veteran
- Subdirektorat Data;
- Subdirektorat Komunikasi Sosial;
- Subbagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

3.1 Definisi dan Penggolongan Veteran RI



Veteran Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam membela dan mempertahankan kedaulatan NKRI atau WNI yang berperan dalam misi perdamaian dunia dalam pasukan internasional di bawah mandat PBB.

PENGGOLONGAN VETERAN RI
UU No. 15 Tahun 2012

PENGGOLONGAN	MASA KEVETERANAN	PERAN
Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia (PKRI)	17 Agustus 1945 Sampai dengan 27 Desember 1949	Berperan dalam masa revolusi fisik
Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia (TRIKORA)	19 Desember 1961 Sampai dengan 1 Mei 1963	Berperan dalam pembebasan Irian Barat, melakukan perjuangan Trikora
Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia (DWIKORA)	3 Mei 1964 Sampai dengan 11 Agustus 1966	Berperan dalam melakukan Perjuangan saat Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia
Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia (SEROJA)	19 Desember 1961 Sampai dengan 1 Mei 1963	Berperan dalam Perjuangan operasi Seroja Timor Timur
Veteran Perdamaian Republik Indonesia	Sesuai misi waktu perdamaian PBB	Berperan dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia dibawah mandat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
Veteran Anumerta Republik Indonesia	Sesuai dengan masa perjuangan pada saat melaksanakan penugasan	WNI yang Gugur dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan NKRI atau misi perdamaian dunia



3.2 Peningkatan Kualitas Layanan Veteran

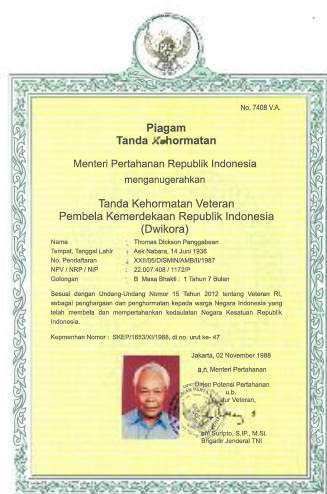
Direktorat Veteran telah melakukan terobosan baru terkait layanan ke veteranan yaitu penyederhanaan proses administrasi pendaftaran Calon Veteran dari 3 tahap menjadi 1 tahap untuk tiga hal sekaligus, yaitu 1) Tanda Kehormatan; 2) Dana Kehormatan, dan 3) Tunjangan Veteran, Tunjangan Janda, Duda, Yatim Piatu.

Program *Three In One* Keptahorvet (piagam) sekaligus mendapatkan Skep tunjangan Veteran, Dana Kehormatan dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu)

**PENDAFTARAN
Calon Veteran**



**PENERBITAN
Tahorvet RI**



**PENERBITAN SKEP
Tuvet/Dahor/Tundayatu**



Jumlah veteran diverifikasi dengan pendataan ke Babinminvet TNI dan Polri. Pada periode 2020-2022, Ditvet telah melaksanakan kegiatan verifikasi data untuk seluruh daerah/wilayah Indonesia. Hasil verifikasi data veteran RI di wilayah Indonesia telah dibukukan dalam sebuah buku induk yang dapat diakses pada <http://isbn.perpusnas.go.id/Admin/Beranda/Ditvet>.

3.3 Tunjangan Veteran

Melalui PP No. 31/2018 Pemerintah telah memberikan perhatian penuh kepada veteran RI, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tunjangan veteran, dana kehormatan dan tunjangan janda-Yatim piatu dengan ketentuan sebagai berikut:

Veteran PKRI dan Pembela Kemerdekaan RI berhak mendapatkan :

- Tunjangan Veteran** (dapat diwariskan dan ada perbedaan indeks antara pensiunan dan non-pensiun);
- Dana Kehormatan** (melekat pada Veteran dengan indeks sama);
- Pemakaman** di TMPNU; dan
- Hak-hak tertentu** yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014.

Veteran Perdamiaan Republik Indonesia berhak mendapatkan :

- Pemakaman di TMP;** dan
- Hak-hak tertentu** yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014

Veteran Anumerta Republik Indonesia berhak mendapatkan :

- Pemakaman di TMP;** dan

b. **Ahli waris** mendapatkan **Dana Kehormatan** dan **Tunjangan Janda, Duda, atau Yatim Piatu** setiap bulannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 ttg Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014.

Disamping itu Veteran RI juga berhak memperoleh Dana Kehormatan, besarnya dana kehormatan adalah Rp. 938.000,- setiap bulannya. Tunjangan veteran juga diberikan setiap bulan, dengan besaran sesuai golongan.

Kementerian Pertahanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan memberikan Bantuan Biaya Upacara Pemakaman Veteran RI sebesar Rp. 2.500.000,-. Pengajuan bantuan dilakukan melalui penyelenggara upacara pemakaman yaitu Komandan Garnizun atau Komandan Komando Kewilayahan TNI setempat. Pada periode tahun 2020 s.d 2022 bantuan diberikan kepada sejumlah penyelenggaraan pemakaman Veteran sebagai berikut:

Tahun	Permohonan Biaya
2020	15 orang
2021	40 orang
2022	7 orang

3.5 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pendaftaran calon veteran dilakukan di kantor Kanminvet Babinminvetcad Ditwatpersal, Ditwatperau, Polri di seluruh wilayah Indonesia. Luasnya wilayah dan tersebarnya penduduk, menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa seluruh veteran terdata dan memperoleh hak-haknya. Untuk itu, Ditvet Ditjen Potan Kemhan RI dalam periode 2020-2022 melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas SDM di berbagai wilayah melalui kegiatan *Workshop* tentang Penyelesaian Administrasi Hak-hak veteran RI sebanyak 11 kali yaitu:

Tahun 2021 di Kota Palembang, Medan, Denpasar, Manado, Surabaya dan Semarang

Tahun 2022 di Kota Ambon, Pontianak, Makassar, Banda Aceh dan Balikpapan



Selain Bimnis, guna mendukung kelancaran proses Pembinaan Administrasi Keveteranan RI yang menjadi tanggungjawab Pembina Veteran di wilayah, Kementerian Pertahanan memberikan bantuan kepada Pembina Administrasi Veteran RI, yang meliputi 15 Babinminvetcaddam, Ditwatpersal, Diswatpersau. Bantuan diberikan setiap tahun.

3.4 Sosialisasi Layanan dan Aturan Keveteranan

Sosialisasi Undang-Undang No. 15 tahun 2012 dilakukan secara terus menerus, baik secara langsung ke daerah, melalui media televisi dan dengan menyelenggarakan Sarasehan Keveteran. Pada tahun 2020-2022 sosialisasi langsung dilakukan di berbagai Daerah di Indonesia.

Bahan sosialisasi melalui televisi adalah iklan layanan masyarakat mengenai penjelasan seorang kakek Veteran RI tentang isi UU No.15 Tahun 2012. Iklan layanan masyarakat ini berdurasi 30 menit dan disiarkan melalui TVRI, AK TV, i News TV, Bandung TV, TV One, Surabaya TV, Celebes TV dan Jogja TV.

3.6 Peningkatan kualitas pelayanan publik terkait veteran

Layanan keveteranan dapat diakses dengan surat dan tanpa surat, datang langsung ke Kantor Ditvet Ditjen Potan Kemhan Gedung R. Suprpto Lantai 7 Jl. Tanah Abang Timur No. 8 Jakarta Pusat, maupun secara elektronik melalui portal : LAPOR: <http://www.lapor.go.id> dan PPID: <http://kemhan.go.id/ppid>

Tahun 2020 jumlah pengaduan sebanyak 24 pengaduan yang terdiri dari:

Permohonan penetapan sebagai anggota LVRI, penolakan PT. Taspen karena usia tidak sesuai UU No. 15/2012, pencairan dana Tuvet, permohonan tentang persyaratan Tundayatu, permohonan tertib administrasi terkait permasalahan Veteran di NTT.

Tahun 2021 jumlah pengaduan sebanyak 22 pengaduan terdiri dari:

Permohonan mendapatkan piagam veteran RI pembela seroja, telaah staf revisi status Tuvet, permasalahan dugaan veteran palsu di NTT, permohonan penghentian pengurusan administrasi veteran di NTT.

Tahun 2022 jumlah pengaduan sebanyak 15 pengaduan terdiri dari:

Timdak lanjut temuan PT. Taspen Cab. Manado terkait permasalahan pembayaran Tuvet, permohonan rumah tinggal bagi janda Veteran PKRI, permohonan penjelasan tentang pengajuan hak-hak veteran, biaya pengambilan SK janda Veteran.

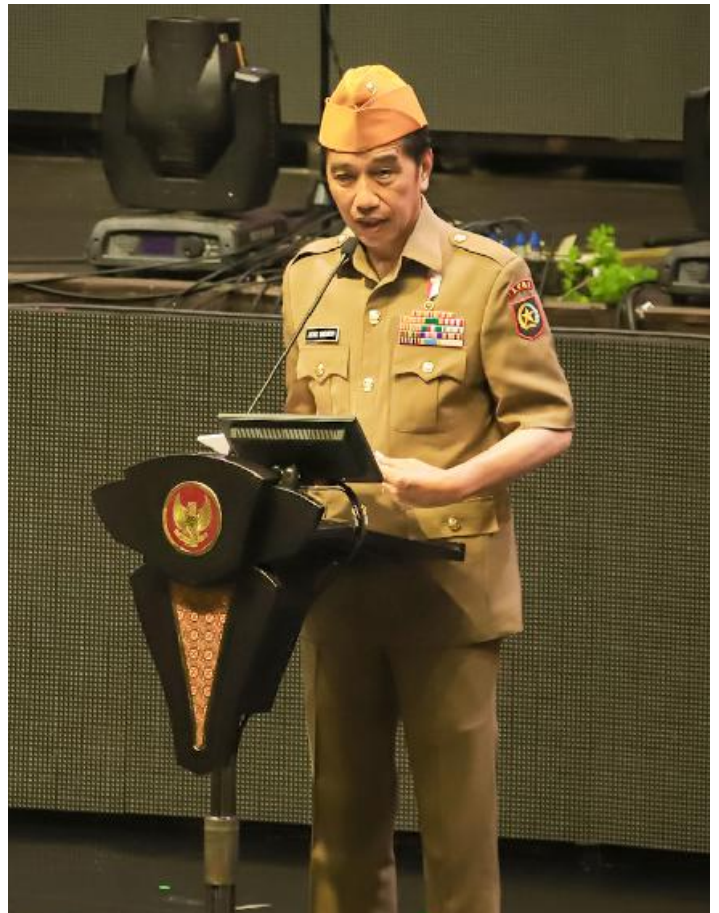




3.7 Koordinasi antar Lembaga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Veteran RI

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, Ditvet Ditjen Potan Kemhan dalam hal ini mengadakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan data dukung kesejahteraan atau keringanan biaya bagi Veteran RI dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Keringanan biaya transportasi darat, laut dan udara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2018 tentang Keringanan biaya penggunaan transportasi jasa angkutan penumpang milik negara bagi Veteran Republik Indonesia sebesar rata-rata 20%.
- b. Keringanan biaya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk Provinsi DKI Jakarta telah menghapus kewajiban pembayaran biaya PBB-P2 bagi Veteran, sedang bagi daerah lain sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing.



Jumlah Veteran RI Sampai Dengan Tahun 2022

DATA VETERAN RI SAMPAI DENGAN TAHUN 2022		
No.	PENGGOLONGAN	VETERAN RI
1.	Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia	245.232 org
2.	Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia	
	a) Trikora	13.534 org
	b) Dwikora	13.278 org
	c) Seroja	29.891 org
3.	Veteran Perdamaian RI	26.365 org
4.	Veteran Anumerta	
	a) Veteran Anumerta PKRI	3 org
	b) Veteran Anumerta Trikora	5 org
	c) Veteran Anumerta Dwikora	1 org
	d) Veteran Anumerta Seroja	107 org
	e) Veteran Anumerta Perdamaian	3 org
	Jumlah	328.509 org





DIREKTORAT SUMBER DAYA PERTAHANAN



4 | Direktorat Sumber Daya Pertahanan

Profil Direktorat Sumber Daya Pertahanan

Direktorat Sumber Daya Pertahanan memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang Sumber Daya Pertahanan. Dalam kurun waktu 2020-2022, Direktorat Sumber Daya Pertahanan telah mengalami pergantian pimpinan yaitu :



Brigjen TNI Priyanto, S.I.P., M.Si(Han)
Juli 2019 sd Okt 2020



Brigjen TNI Fahrid Amran, S.H.
(Okt 2020 sd sekarang)

Fungsi Ditsumdam adalah sebagai berikut :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya pertahanan;
- Penyusunan peraturan di bidang sumber daya pertahanan;
- Pelaksanaan dan fasilitas kebijakan di bidang sumber daya pertahanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang sumber daya pertahanan; dan
- Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Ditsumdam terdiri atas :

- Subdirektorat Perencanaan dan Penyediaan Komponen Cadangan
- Subdirektorat Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan
- Subdirektorat Sumber Daya Manusia Pendukung Pertahanan
- Subdirektorat Sarana Prasarana Pendukung Pertahanan
- Subdirektorat Sumber Daya Alam dan Buatan Pendukung Pertahanan





4.1 Regulasi Dan Kebijakan Ditsumdahan Selama Periode 2020 – 2022

1. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2019 tentang PSDN Hanbeg
2. Permenhan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan dan Pembinaan Komcad
3. Permenhan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kurikulum Latsarmil Komcad
4. Permenhan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyiapan Komduk
5. Permenhan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelatihan Penyegaran Komcad
6. Permenhan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan terhadap Warga Negara yang berperan aktif dan berjasa dalam Komcad
7. Buku Petunjuk Sosialisasi Komcad
8. Roadmap SDM Komduk Hanbeg
9. Roadmap SDAB Komduk Hanbeg
10. Roadmap Sarprasnas Komduk Hanbeg
11. Buku Tabin SDM Komduk Hanbeg
12. Buku Tabin SDAB Komduk Hanbeg
13. Buku Tabin SARPRAS Komduk Hanbeg
14. NSPK SDAB Komduk Hanbeg
15. NSPK Sarpras Komduk Hanbeg
16. NSPK SDM Komduk Hanbeg
17. Buku Pedoman Sosialisasi SDAB Komduk Hanbeg
18. Buku Pedoman Sosialisasi Sarprasnas Komduk Hanbeg
19. Buku Pedoman Bimnis SDAB Komduk Hanbeg
20. Buku Pedoman Bimnis Sarprasnas Komduk Hanbeg
21. Buku Pedoman Simulasi SDAB Komduk Hanbeg
22. Buku Pedoman Simulasi Sarprasnas Komduk Hanbeg



Rapat PERMENHAN Tentang Pembentukan, Penetapan dan Pembinaan Komcad



RAPAT PERMENHAN tentang KURIKULUM LATSARMIL KOMCAD



Rapat PERMENHAN tentang Penyiapan KOMDUK HANBEG



Regulasi Produk Ditsumdahan

4.2 | Komponen Pendukung

Sebagai dasar bagi penataan dan pembinaan komponen pendukung SDM, SDAB dan sarprasnas dilaksanakan beberapa program terkait pembuatan Roadmap, NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria), Buku Pedoman Bimbingan Teknis, Buku Pedoman Simulasi dan Buku Pedoman Sosialisasi.

Roadmap SDM, SDAB dan SARPRAS

Roadmap adalah dokumen rencana kerja yang mengintegrasikan seluruh rencana kerja dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu.

Agar perencanaan penataan dan pembinaan Komponen Pendukung (Komduk) berjalan sesuai yang diharapkan maka disusunlah Roadmap SDM, SDAB dan Sarpras Komponen Pendukung Pertahanan Negara yang dijadikan sebagai pedoman kerja bagi

pemangku kepentingan dalam melaksanakan penataan dan pembinaan Komponen Pendukung Pertahanan Negara sehingga dapat terlaksana dengan tertib, terarah, terukur dan akuntabel dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Kegiatan penyusunan roadmap melibatkan Kementerian/Lembaga dan narasumber yang terkait, Pemerintah Daerah, serta Mabes Angkatan.



Rapat Roadmap KOMDUK HANNEG



Rapat Penyusunan NSPK KOMDUK HANNEG

Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) SDM, SDAB dan SARPRAS

Dalam rangka Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung Pertahanan Negara, Direktorat Sumber Daya Pertahanan telah menyusun Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) SDM, SDAB dan SARPRAS, yaitu aturan atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyiapan SDM, SDAB dan SARPRAS yang akan ditetapkan sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara. Kegiatan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) melibatkan Kementerian/Lembaga dan narasumber terkait, Pemerintah Daerah, Mabes TNI dan Angkatan serta BUMN.



Buku Pedoman Bimbingan Teknis SDAB dan SARPRAS

Kegiatan bimbingan Teknis merupakan bagian dari kegiatan pembinaan Komponen Pendukung pertahanan negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah. Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatannya maka disusun Pedoman Bimbingan Teknis.

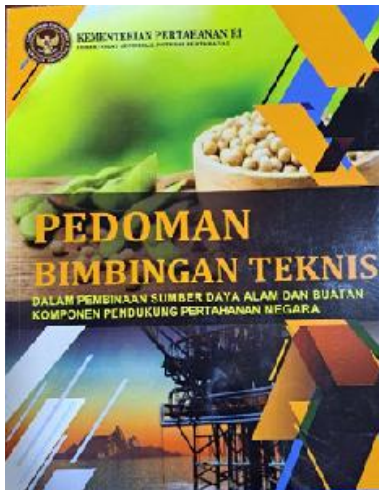
Pedoman Bimbingan Teknis dimaksudkan untuk dijadikan panduan pelaksanaan, langkah dan tahapan penyelenggaraan dalam rangka pembinaan SDAB dan Sarpras yang telah ditetapkan sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara. Dalam penyusunan Buku Pedoman Bimbingan Teknis SDAB dan Sarpras melibatkan Kementerian/Lembaga dan narasumber terkait, Pemerintah Daerah, Mabes TNI dan Angkatan serta BUMN.



Rapat Penyusunan NSPK KOMDUK HANNEG



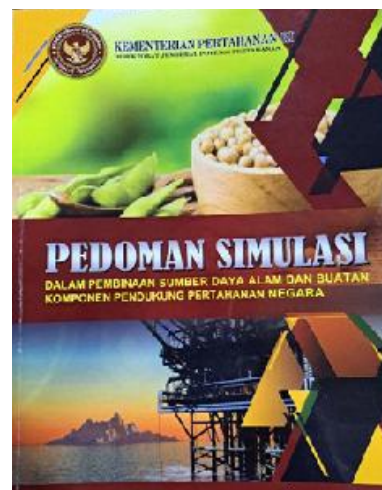
Rapat Penyusunan
Pedoman BIMTEK KOMDUK HANNEG



Rapat Penyusunan Pedoman Simulasi
KOMDUK HANNEG

Pedoman Simulasi SDAB dan SARPRAS

Simulasi merupakan rangkaian kegiatan pembinaan setelah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis. Simulasi sebagai kegiatan paripurna dari rangkaian kegiatan pembinaan yang bertujuan memberikan pengetahuan mengenai peran masing-masing bagian Komponen Pendukung dalam membantu meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Dengan tersusunnya Pedoman Simulasi SDAB dan Sarprasnas diharapkan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan simulasi kepada pemilik SDAB dan Sarprasnas yang telah ditetapkan sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara. Kegiatan penyusunan Pedoman Simulasi SDAB dan Sarprasnas melibatkan Kementerian/Lembaga dan narasumber terkait, Pemerintah Daerah, Mabes TNI dan Angkatan serta BUMN.



Pedoman Sosialisasi SDAB dan SARPRAS

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDAB dan Sarpras yang telah ditetapkan sebagai Komponen Pendukung yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan, maka perlu adanya pembinaan yang berupa Sosialisasi. Guna kesamaan dan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan dan tercapainya tujuan sosialisasi, maka perlu disusun Pedoman Sosialisasi SDAB dan Sarpras sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta BUMN dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pengelola/pemilik SDAB dan Sarpras miliknya yang telah ditetapkan sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara. Penyusunan Buku Pedoman Sosialisasi SDAB dan Sarpras melibatkan Kementerian/Lembaga dan narasumber terkait, Pemerintah Daerah, Mabes TNI dan Angkatan serta BUMN.



Pedoman Penataan dan Pembinaan SDM, SDAB dan SARPRAS Komponen Pendukung Pertahanan Negara

Pengelolaan Komponen Pendukung meliputi kegiatan penataan dan pembinaan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Komponen Pendukung dilaksanakan dalam system tata kelola pertahanan negara yang demokratis, berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia serta mentaati peraturan perundang-undangan.

Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah menyiapkan Kebijakan tentang Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung melalui koordinasi dan sinkronisasi sehingga pelaksanaan penataan dan pembinaan tidak mengganggu fungsi pelayanan kepada masyarakat namun pembangunan bidang pertahanan dapat berjalan seiring dengan pembangunan untuk kesejahteraan.

Dengan tersusunnya Pedoman Penataan dan Pembinaan SDM, SDAB dan Sarpras Komponen Pendukung Pertahanan Negara maka diharapkan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penataan dan



Rapat Penyusunan Pedoman Simulasi
KOMDUK HANNEG

Pembinaan Komponen Pendukung Pertahanan Negara. Penyusunan Pedoman Penataan dan Pembinaan SDM, SDAB dan SARPRAS Komponen Pendukung Pertahanan Negara melibatkan Kementerian/Lembaga dan narasumber terkait, Pemerintah Daerah, Mabes TNI dan Angkatan serta BUMN.



Pendataan Komponen Pendukung

Komponen Pendukung adalah Sumber Daya Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

Selama kurun waktu 2020 – 2022, Direktorat Sumber Daya Pertahanan telah melaksanakan penataan dan pembinaan komponen pendukung dalam tiga segmen antara lain sebagai berikut:

- Warga Negara;
- Sumber Daya Alam dan Buatan; dan
- Sarana dan Prasarana Nasional.

Warga Negara

- Warga Terlatih, merupakan SDM yang terlatih di bidang tugasnya sehingga pada saat darurat perang dapat dikerahkan menjadi Komponen Cadangan melalui latihan dasar kemiliteran.
- Tenaga Ahli, yaitu SDM yang memiliki keahlian sesuai profesi dalam lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
- Warga Lain Unsur Warga Negara adalah SDM yang tidak termasuk dalam warga terlatih maupun tenaga ahli profesi namun memenuhi syarat secara fisik maupun psikis sebagai Komponen Pendukung.

Sebagai Langkah awal dari penataan dan pembinaan Komponen Pendukung Pertahanan Negara di daerah khususnya aspek sumber daya manusia mencakup warga terlatih, tenaga ahli dan profesi serta warga lain unsur warga negara baik individu maupun sebagai ormas dilakukan pendataan di Provinsi Papua Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Maluku Utara.

Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB)

- Logistik Wilayah, yaitu logistik yang disiapkan dengan bertumpu pada sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut guna mendukung operasi militer.

2. Cadangan Materiil Strategis (Cadmatstrat) adalah bahan dan atau hasil pertambangan serta alat peralatan industri untuk mendukung pertahanan negara.

Kegiatan pendataan merupakan salah satu program dalam rangka mengidentifikasi potensi SDAB di seluruh wilayah Indonesia yang dapat di manfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara sebagai wujud dari Sishanta. Tahun 2020 sudah dilaksanakan pendataan SDAB di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Lampung.

Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional yang terdiri atas sarprasnas matra darat, laut dan udara.
2. Industri Nasional adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi barang yang memiliki nilai tambah (termasuk industri jasa) yang berguna untuk kepentingan pertahanan negara.

Penataan dan pembinaan sarana prasarana Komponen Pendukung dilaksanakan melalui kegiatan pendataan serta sosialisasi kebijakan sarana prasarana komponen pendukung di K/L, Pemerintah Daerah maupun swasta sebagai pemilik sekaligus pengelola sarana prasarana tersebut. Tahun 2020 sudah dilaksanakan pendataan sarpras di daerah Lampung, Sumbar, Kepri dan Kalteng.

Sebagaimana dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara bahwa Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya.

Serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa

dari segala ancaman, oleh karena itu melalui kegiatan Pendataan diharapkan akan diperoleh data SDM, SDAB dan Sarpras Nasional untuk komponen pendukung yang valid dan akurat.



4.3 | Komponen Pendukung Bidang Kesehatan



Pendataan Bidang KOMDUK HANNEG

Pada pertengahan tahun 2020 seluruh dunia dilanda Pandemi Covid-19, sehingga dalam membantu pemerintah menghadapi wabah pandemi Covid-19 ini, pada tahun 2020 s.d. 2021 Kementerian Pertahanan membentuk Relawan Komponen Pendukung Bidang Kesehatan yang bekerjasama dengan Gugus Tugas BNPB dan Kementerian Kesehatan.

Relawan Komduk bidang Kesehatan diambil dari tenaga ahli dibidang kesehatan yang diseleksi dan mengikuti Bimbingan Teknis selanjutnya melaksanakan penugasan di RS. Suyoto dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Relawan Komduk Bidang Kesehatan yang diadakan dibentuk dalam 5 gelombang melihat tingginya kasus Covid 19 tersebut yaitu :





SESI/TAHAP	TANGGAL	JUMLAH RELAWAN
Gelombang I	pada tanggal 4 Mei s.d. 4 Agustus 2020	293 orang relawan
Gelombang II	pada tanggal 14 Sep s.d. 13 Desember 2020	55 orang relawan
Gelombang III	pada tanggal 16 April s.d. 14 Juli 2021	45 orang relawan
Gelombang IV	pada tanggal 29 Juni s.d. 26 September 2021	150 orang relawan
Gelombang V	pada tanggal 15 Juli s.d. 12 Oktober 2021	136 orang relawan
	Total relawan Komponen Pendukung Bidang Kesehatan	679 orang relawan

4.4 Sosialisasi UU PSDN Bidang Komponen Pendukung

Setelah disahkan menjadi Undang-Undang PSDN Haneg, kegiatan sosialisasi dilaksanakan bertujuan agar tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 serta terwujudnya persamaan persepsi tentang pelaksanaan penataan dan pembinaan SDM, SDAB dan sarpras untuk komponen pendukung agar siap digunakan untuk pertahanan negara.

Sosialisasi yang terkait dengan Komponen Pendukung telah dilaksanakan di daerah Sosialisasi tersebut dilaksanakan kepada peserta dari Kementerian dan Lembaga diantaranya:



Sosialisasi UU PSDN Bidang SDAB KOMDUK HANNEG

Sosialisasi UU PSDN Bidang SDM KOMDUK HANNEG



4.5 | Komponen Cadangan



1. Desain Raya (Grand Design) Postur Komponen Cadangan Pertahanan Negara 2020 – 2044.

Pada tahun 2020, Subdit Rendia melaksanakan rapat mengenai Grand Design Postur Komcad Hanneg 2020-2044 rapat ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang rencana pembangunan Postur Komponen Cadangan selama kurun waktu 25 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2044 dengan mempertimbangkan pembangunan postur TNI dan program pembangunan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Dengan tersusunnya Grand Design Postur Komcad Hanneg 2020-2044 akan menjadi dokumen perencanaan strategis pembangunan Postur Komponen cadangan dalam kurun waktu 25 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2044 dengan tujuan mewujudkan sinkronisasi Pembangunan Postur Komponen Cadangan dengan pembangunan kekuatan TNI serta program pembangunan nasional. Rapat Penyusunan grand design Postur Komponen Cadangan Pertahanan Negara 2020 –



2044 pada hari Senin (10/02/2020) bertempat di Ruang Rapat VIP Gedung R. Soeprapto Lt. 8 Ditjen Potan Kemhan, dipimpin oleh Direktur Sumdahan Brigjen TNI Priyanto, S. IP., M.Si (Han), dengan narasumber Direktur SDM Ditjen Kuathan Kemhan Brigjen TNI R. Tjahya Komara, Prof. Dr. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D dari President University, dan DR. DKS. Nugraha, S.P.,M.Si., MBA-GSC dari CSDC Universitas Indonesia

2. Rencana Kerja Strategis Pengelolaan Komponen Cadangan Pertahanan Negara 2020-2024.

Pada tahun 2020, subdit Rendia mengadakan rapat tentang Rencana Kerja Strategis. Penyusunan rencana kinerja ini bertujuan yaitu menetapkan target indikator sasaran, merumuskan kegiatan pokok, merumuskan indikator kegiatan, merumuskan satuan setiap indikator kegiatan, dan menetapkan target setiap indikator pada kegiatan yang satuannya telah ditetapkan sehingga dalam rencana strategis yang akan disusun untuk tahun 2020 – 2024 dapat terlaksana sesuai target kinerja yang akan dicapai, ditambahkan juga pembuatan regulasi pengelolaan komponen cadangan, pembuatan sistem aplikasi Sumdahan, dan pembentukan 25.000 anggota komcad.

3. FGD Rancangan Perpres Tentang Besaran Dan Tata Cara Pemberian Tunjangan Operasi Anggota Komponen Cadangan Pada Saat Mobilisasi.

FGD ini dilaksanakan dengan maksud:

1. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan FGD Rancangan Perpres tentang



FGD rancangan perpres tentang besaran dan tata cara pemberian tunjangan operasi anggota komponen cadangan pada saat mobilisasi, dengan nara sumber: Dr. DKS. Nugraha, S.P., M.Si, MBA, GSc. dan Prof. Anak Agung Banyu Perwita

besaran dan tata cara pemberian tunjangan operasi anggota Komponen Cadangan

2. Mendapatkan saran dan masukan dari peserta kegiatan FGD untuk penyusunan Perpres tentang besaran dan tata cara pemberian tunjangan operasi anggota Komponen Cadangan
3. Mengetahui permasalahan/kendala yang timbul pada saat nanti pemberlakuan Perpres tentang besaran dan tata cara pemberian tunjangan operasi anggota Komponen Cadangan

Rakor dan Sosialisasi Pembentukan Komcad

Rapat Koordinasi Panitia Pusat Pembentukan Komponen Cadangan

Rapat Koordinasi Panitia Pusat Pembentukan Komponen Cadangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan pihak-pihak terkait dalam rencana pembentukan komponen cadangan matra darat. Masing-masing pihak yang terkait dalam rakor ini memaparkan kesiapan proses pembentukan Komponen Cadangan

Pembentukan Komponen Cadangan TA. 2021.

Seleksi Administratif dan Kompetensi penerimaan Komponen Cadangan Matra Darat TA. 2021 diadakan pada tanggal 1 s.d. 17 Juni 2021, sedangkan pendidikan pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan dimulai tanggal 21 Juni s.d. 18 September 2021.



Pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran dilaksanakan di Rayon I (Pulau Jawa) dan Rayon III (P. Kalimantan), dengan alokasi sebanyak 2500 orang. Pendidikan dilaksanakan di Rindam-Rindam yang ada di Pulau Jawa dan Kalimantan yaitu Rindam Jaya/Jaya, Rindam III/Slw, Rindam IV/Dip, Rindam V/Brw dan Rindam XII/Tanjung Pura.

Pembentukan Komponen Cadangan TA. 2022.

Seleksi Administratif dan Kompetensi penerimaan Komponen Cadangan Matra Darat TA. 2022 diadakan pada tanggal 9 s.d. 27 Mei 2022, sedangkan pendidikan pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan dimulai tanggal 30 Mei s.d. 27 Agustus 2022.

Pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran dilaksanakan di Rayon I (Pulau Jawa), Rayon II (P. Sumatra) dan Rayon III (P. Kalimantan dan P. Sulawesi), dengan alokasi sebanyak 2500 orang. Pendidikan dilaksanakan di Satuan pendidikan yaitu Matra Darat (Rindam II/Swj, Rindam VI/MLw, Rindam XIV/Hsn, Pusdik Kowad Kodiklatad), Matra Laut (Kodikmar Kodiklatad) dan Matra Udara (Pusdiklat Kopasgat).

Penerimaan calon peserta didik Komponen Cadangan TA. 2021 dan TA. 2022 berasal dari warga negara dengan berbagai macam profesi seperti mahasiswa, Dosen, Guru, CPNS/PNS, Honorer dan pegawai BUMN/BUMS.

Sebelum pelaksanaan pembentukan Komponen Cadangan dilaksanakan Rapat Koordinasi Panitia Pusat yang dihadiri, antara lain : Pejabat Kemendagri, Pejabat Kemen BUMN, Pejabat Kemenpan RB, Rektor/Wakil dari Akademisi, Pejabat Eselon II dan III jajaran Kemhan, Pejabat Eselon II dan III TNI AD, Danrindam yang akan melaksanakan Latsarmil, Kodiklatad serta Perwakilan dari Ormas.

Rapat Koordinasi Panitia Pusat Pembentukan
Komponen Cadangan



Sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2019

Pada tahun 2021, Kegiatan Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (SDN) untuk Pertahanan Negara yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI berlangsung di 15 wilayah Kodam. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bersama-sama dengan unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah (Pemda), Instansi BUMN /BUMS, Akademisi/ Perguruan Tinggi, Ormas dan masyarakat lainnya di 15 wilayah Kodam bertempat di Aula masing-masing Kodam setempat. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari dengan materi kegiatan sosialisasi UU nomor 23 tahun 2012 tentang Pengelolaan sumber daya nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang meliputi Bela negara, Komponen pendukung dan Komponen Cadangan, Mobilisasi dan Demobilisasi melalui tinjauan dari aspek politik dan hukum semangat bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI dan tatacara pembentukan Komponen Cadangan (perekrutan dan Latsarmil).

Sosialisasi UU No 23 TH 2019 Di 15 KODAM



Sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2019 melalui Media Cetak, Media Sosial dan Sosial Media.

Dalam mensosialisasikan UU Nomor 23 tahun 2019, Kementerian Pertahanan selaku Stakeholder utama dalam membangun dan mengembangkan Komponen Cadangan yang dalam hal ini adalah sumber daya manusia, mensosialisasikan melalui sebuah sistem informasi yang mampu mengakomodir segala kebutuhan dalam serangkaian kegiatan pembentukan Komponen Cadangan melalui Media Cetak, Media Sosial dan Sosial Media. Informasi berisi diantaranya pengumuman akan dibukanya pendaftaran calon Komponen Cadangan.

Sosialisasi UU No 23 TH 2019 melalui media cetak



Seleksi Komponen Cadangan

Kegiatan Pembentukan Komponen Cadangan dilaksanakan melalui pendaftaran, seleksi, Latsarmil dan Penetapan yang dilaksanakan oleh Ditjen Potan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan. Pendaftaran Komponen Cadangan merupakan kegiatan penerimaan Calon Komponen Cadangan yang dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pengumuman dan pelamaran. Seleksi Pembentukan Calon Komponen Cadangan merupakan kegiatan pemilihan calon Komponen Cadangan yang akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran meliputi seleksi administratif dan seleksi kompetensi. Seleksi administratif merupakan proses pemeriksaan kelengkapan administrasi dan uji keabsahaan dokumen yang dilaksanakan oleh panitia seleksi daerah dan menentukan calon Komponen Cadangan lulus atau tidak seleksi administratif.

Bagi calon Komponen Cadangan yang lulus dapat mengikuti seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi merupakan proses uji kesehatan, kemampuan, pengetahuan/ wawasan dan sikap calon Komponen Cadangan. Bagi calon Komponen Cadangan yang lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti Latsarmil selama 3 bulan di Lemdik TNI atau kesatuan TNI.

Proses Seleksi Komponen Cadangan





Pelatihan Dasar Militer Komponen Cadangan

Calon Komponen Cadangan yang dinyatakan lulus seleksi mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Pelatihan dasar kemiliteran dilaksanakan berdasarkan Permenhan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kurikulum Latsarmil. Pelaksanaan Latsarmil TA.2021 dilaksanakan di Rayon I (P. Jawa) dan Rayon III (P. Kalimantan), dilaksanakan dari tanggal 21 Juni s.d. 18 September. Pelaksanaan Latsarmil TA.2022 dilaksanakan di Rayon 1 (Pusdiklat Pasgat, Pusdik Kowad Kodiklatad, Kodikmar). Rayon II (Rindam II/SWJ). Rayon III (Rindam VI/MLW, Rindam XIV/HSN) dilaksanakan tanggal 30 Mei s.d. 27 Agustus 2022. Calon Komponen Cadangan yang telah dinyatakan lulus Latsarmil diangkat, dilantik dan ditetapkan serta wajib mengucapkan sumpah/janji sebagai Komponen Cadangan. Penetapan, Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penetapan Komponen Cadangan

Pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) merupakan amanat Undang-Undang Negara RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, yang mengamanatkan Pembentukan Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara, yang pelaksanaannya melalui tahapan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan, yang selanjutnya Komcad ini akan digunakan untuk memperkuat dan memperbesar kekuatan TNI pada saat negara membutuhkan. Salah satu perwujudan pembentukan Komponen cadangan adalah penetapan Komponen Cadangan sebagai bentuk strategi antisipatif agar kita siap menghadapi ancaman dan gangguan terhadap kehidupan bangsa.

Rakor Penetapan Panitia Pusat Pelatihan Penyegaran Komponen Cadangan Maksud :

1. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan Rakor Penetapan Panitia Pusat Pelatihan Penyegaran Komponen Cadangan
2. Mendapatkan saran dan masukan dari peserta kegiatan Rakor Penetapan Panitia Pusat Pelatihan Penyegaran Komponen Cadangan



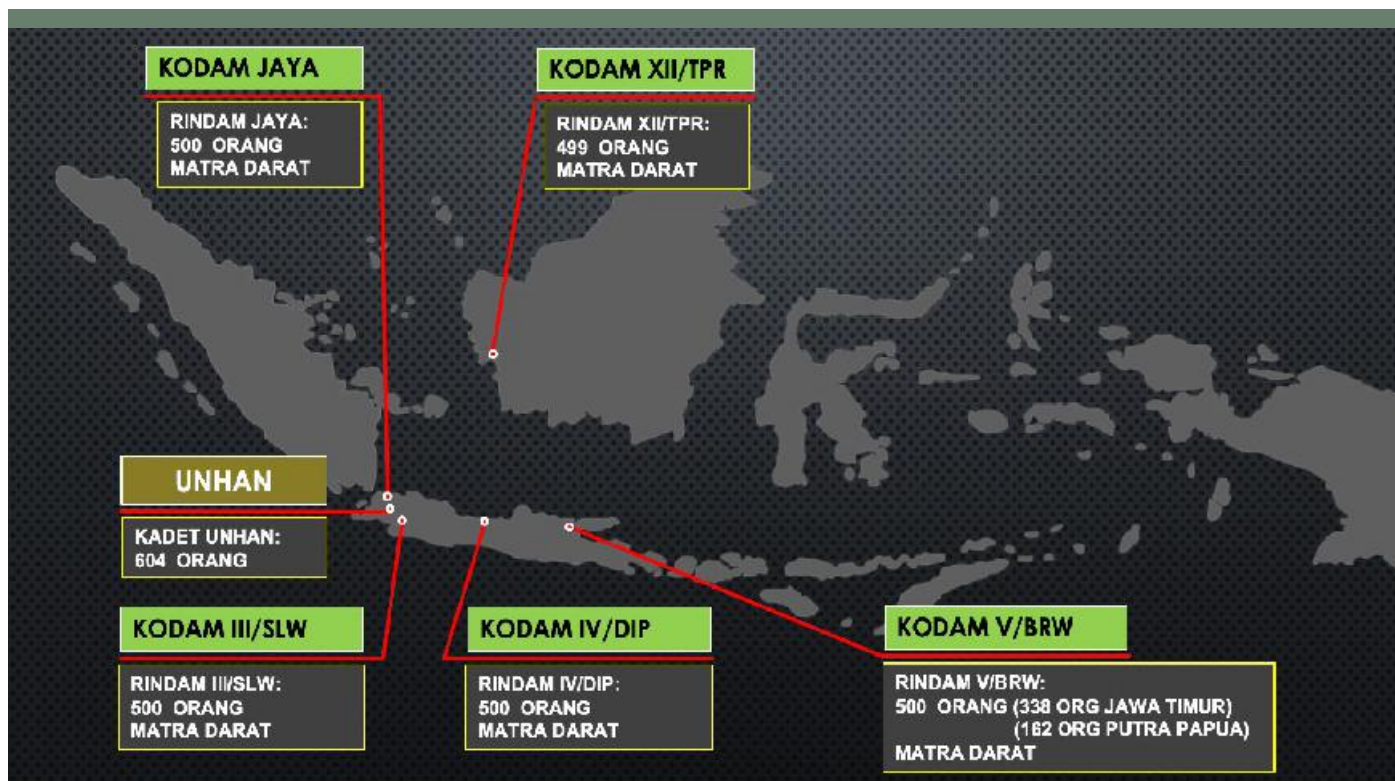


Maksud :

3. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan Rakor Penetapan Panitia Daerah Pelatihan Penyegaran Komponen Cadangan
4. Mendapatkan saran dan masukan dari peserta kegiatan Rakor Penetapan Panitia Daerah Pelatihan Penyegaran Komponen Cadangan
5. Mengetahui permasalahan/kendala yang timbul pada saat nanti pemberlakuan Penetapan Panitia Daerah Pelatihan Penyegaran Komponen Cadangan



Dislokasi Komponen Cadangan Tahun 2021



Dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sumber daya Nasional Untuk Pertahanan Negara beserta aturan turunannya, Kementerian Pertahanan bersama TNI telah melaksanakan salah satu amanat dari Undang Undang tersebut yaitu pembentukan Komponen Cadangan.

Pada tahun 2021 telah dibentuk dan ditetapkan Komponen Cadangan Angkatan pertama khusus Matra Darat sebanyak 3.103 orang, terdiri dari:

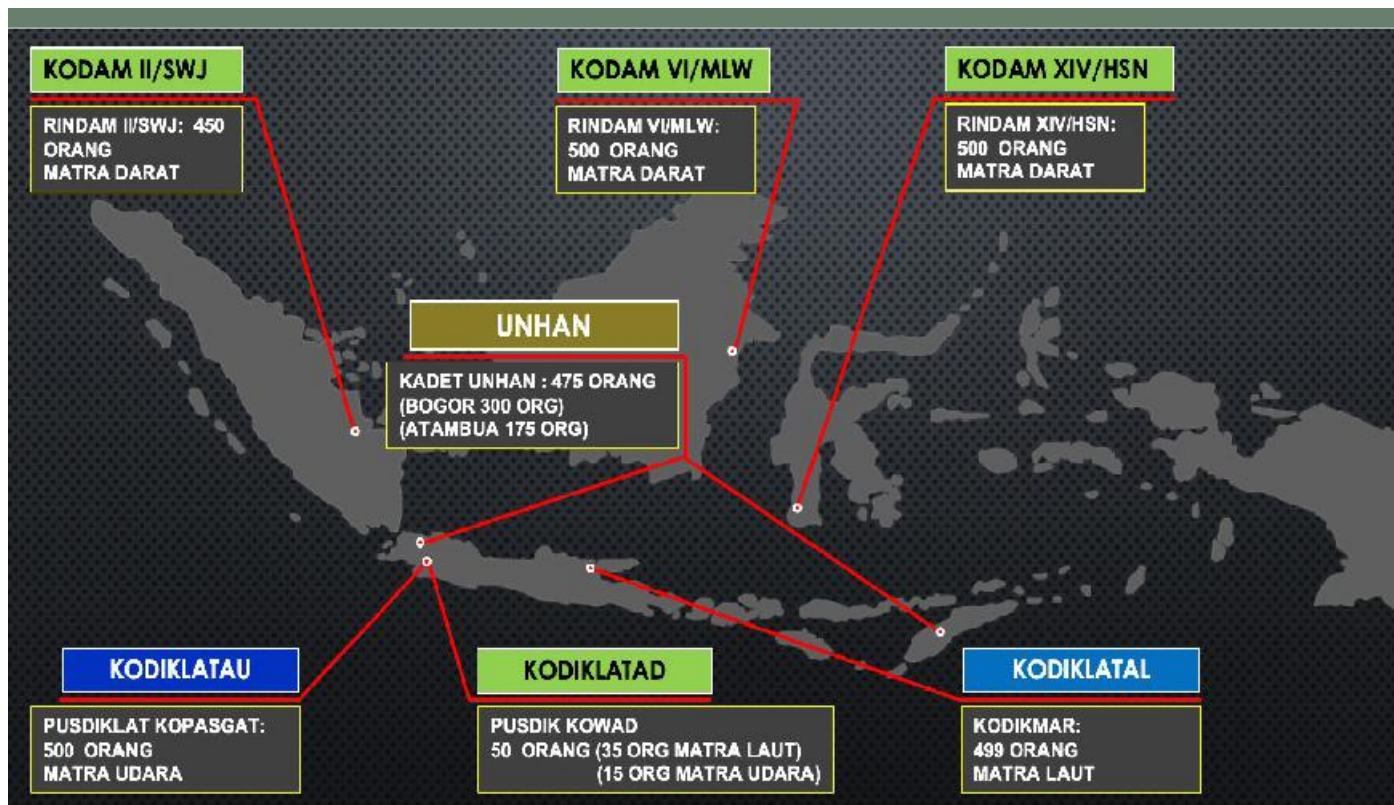
1. Rindam Jaya sebanyak 500 orang.
2. Rindam III/Siliwangi sebanyak 500 orang.
3. Rindam IV/Diponegoro sebanyak 500 orang,
4. Rindam V/Brawijaya, sebanyak 500 orang, dengan rincian 338 Orang dari Jawa Timurdan 162 orang dari Papua.
5. Rindam XII/Tanjungpura sebanyak 499 orang, dengan rincian Kalimantan Barat 109 orang dan Kalimantan Tengah 390 orang.
6. Kadet Unhan sebanyak 604 orang





Dokumentasi Penetapan Komponen Cadangan

Dislokasi Komponen Cadangan Tahun 2022



Pada tahun 2022 telah dibentuk dan ditetapkan Komponen Cadangan angkatan kedua yang terdiri dari tiga Matra meliputi Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara sebanyak 2.974 orang, sebagai berikut:

1. Rindam II/Sriwijaya sebanyak 450 orang
2. Rindam VI/Mulawarman sebanyak 500 orang
3. Rindam XIV/Hasanudin sebanyak 500 orang
4. Pusat Pendidikan Kowad sebanyak 50 orang (Wanita)
5. Komando Pendidikan Marinir sebanyak 499 orang
6. Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Gerak Cepat sebanyak 500 orang
7. Kadet Unhan sebanyak 475 orang yang terdiri dari:
 - a. Bogor sebanyak 300 orang
 - b. Atambua sebanyak 175 orang







DIREKTORAT
BELA NEGARA



BELA
NEGARA

5

Direktorat Bela Negara

Profil Direktorat Bela Negara

Direktorat Bela Negara selanjutnya disebut Dit Bela Negara adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Bela Negara disebut Dir Belneg mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang penataan dan pembinaan bela negara. Dalam kurun waktu 2021-2022, Direktorat Bela Negara telah mengalami pergantian pimpinan yaitu:



Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto, S.Sos., M.M.
Nov 2019 sd Nov 2022



Brigjen TNI Sarwono, B.Sc., S.I.P., PSC.
Nov 2022 sd sekarang

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Direktorat Bela Negara menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan Bela Negara;
- penyusunan peraturan di bidang penataan dan pembinaan Bela Negara;
- pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan Bela Negara;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang penataan dan pembinaan Bela Negara;
- pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Bela Negara terbagi dalam tiga Sub Direktorat, yaitu Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan, Sub Direktorat Lingkungan Pekerjaan dan Sub Direktorat Lingkungan Pemukiman.

Subdit Lingkungan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan peraturan, pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan laporan dibidang materi dan metode penataan serta pembinaan kesadaran Bela Negara di lingkungan pendidikan.

Subdit Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan laporan dibidang materi dan metode penataan serta pembinaan kesadaran Bela Negara di lingkungan Pemukiman/Kemasyarakatan.

Subdit Lingkungan Perkerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan laporan dibidang materi dan metode penataan serta pembinaan kesadaran Bela Negara di lingkungan pekerjaan.

5.1 Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Perkembangan geopolitik internasional berlangsung sangat cepat dan kompleks serta menghadirkan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Konstelasi geografi Indonesia yang berada pada persilangan dua benua dan dua samudra menjadikan perairan Indonesia berfungsi sebagai jalur komunikasi dan jalur transportasi laut yang sangat strategis bagi dunia internasional, serta sebagai pelintasan kepentingan nasional berbagai negara di dunia. Kondisi ini juga mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional.

Ancaman merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan implikasi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman tersebut dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam rangka menghadapi kompleksitas ancaman sebagaimana disebutkan di atas, perlu dibangun sikap mental dan karakter Bela Negara setiap warga negara, sehingga memiliki daya tangkal bangsa dan kesiapsiagaan dalam menghadapi setiap ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

Guna membangun sikap mental dimaksud perlu dilaksanakan PKBN bagi seluruh warga negara Indonesia. PKBN ditujukan untuk membangun dan membentuk sikap mental serta karakter setiap warga negara Indonesia agar memiliki kesadaran Bela Negara, yaitu warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal Bela Negara, sebagai nilai dasar Bela Negara.

Kebijakan PKBN ini diharapkan dapat menjadi dasar upaya mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki karakter Bela Negara, dalam memperkuat pertahanan Indonesia menuju seratus tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045.

Dalam pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Kementerian Pertahanan beserta Kementerian/Lembaga, TNI, dan Polri telah menyusun Rencana Induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara 2020 - 2044 yang merupakan rencana pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara selama kurun waktu 25 tahun yang terdiri dari beberapa tahap dimulai dari penataan (2020-2024), penguatan (2025- 2029), pengembangan (2030-2034), pemantapan (2035-2039) dan tahap terakhir pencapaian tertinggi (2040-2044) diharapkan periode ini terwujudnya sikap mental dan karakter Bela Negara yang tangguh bagi seluruh warga negara Indonesia yang memiliki daya tangkal dan kesiapsiagaan menghadapi segala ancaman. Selanjutnya Rencana Induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara 2020 - 2044 tersebut diimplementasikan melalui Rencana Aksi Nasional Bela Negara lima tahunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Hal ini merupakan tanggungjawab bersama Kementerian/Lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.

Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang masif, sinergi dan berkesinambungan di seluruh Indonesia dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan menjabarkan Nilai Dasar Bela Negara, yaitu :

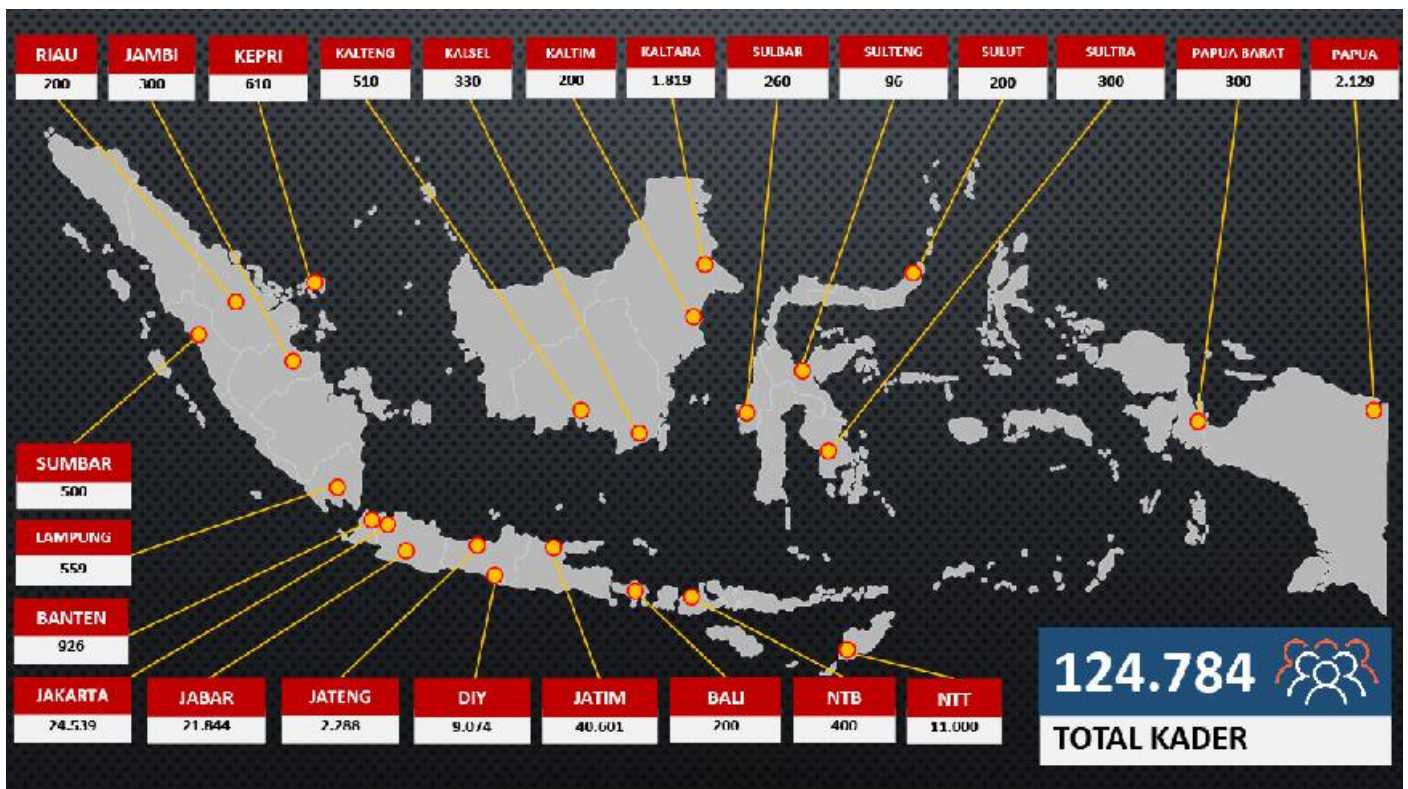
1. Cinta Tanah Air;
2. Sadar berbangsa dan bernegara;
3. Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara;
4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan negara; dan
5. Kemampuan Awal Bela Negara.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, target pembentukan Kader Bela Negara selama lima tahun adalah sebesar 215.000 kader Bela Negara berarti setiap tahun harus mencapai target sebesar 43.000 kader Bela Negara. Dalam pelaksanaannya dalam kurun waktu dua tahun Kementerian Pertahanan bersama Kementerian/Lembaga terkait lainnya telah mampu membentuk kader Bela Negara sebanyak 124.784 kader yang seharusnya dalam dua tahun sebanyak 86.000 kader Bela Negara, termasuk kegiatan pemberian Piagam Penghargaan dan PIN Patriot Bela Negara kepada pejuang Eks Timor-Timur sejumlah 11.000 orang.

Rencana Induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara 2020 - 2044



Jumlah Kader Bela Negara Tahun 2020 - 2022



5.2 Regulasi Bela Negara

Sebagai perumus kebijakan, pada periode 2020 hingga Oktober 2022, Direktorat Bela Negara Ditjen Potan telah menghasilkan produk-produk kebijakan berupa :

- a. Tahun 2020
 1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- b. Tahun 2021
 1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
 2. Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
 3. Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kader Bela Negara dan Fasilitator Bela Negara.
- c. Tahun 2022
 1. Perpres nomor 115 tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara
 2. Peraturan Menteri Pertahanan nomor 8

tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

3. Peraturan Menteri Pertahanan nomor 9 tahun 2022 tentang Kader Bela Negara dan Fasilitator Bela Negara.
4. Peraturan Menteri Pertahanan No.14 Tahun 2022. Tentang Pedoman Pembinaan dalam pengabdian sesuai dengan profesi

Selain regulasi, untuk sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Kementerian Pertahanan membuat kerjasama dengan berbagai Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah maupun Organisasi Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut

1. Subdit Lingdik
 - b. Kesepakatan bersama antara Kementerian Pertahanan dengan 13 K/L tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara
 - c. Perjanjian Kerjasama Antara Ditjen Potan Kemhan Dengan Fisip Unila
 - d. Perjanjian Kerjasama Antara Ditjen Potan Kemhan Dengan LLDIKTI
- 2). Subdit Lingkim

Kesepakatan antara Kemhan dan Bank Mandiri. Tentang Pembuatan ATM sekaligus KTA Kader Bela Negara
- 3). Subdit Lingja



serah terima Jabatan Direktur Bela Negara Ditjen Potan Kemhan dari Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto, S. Sos., M.M. kepada Brigjen TNI Sarwono,

5.3 Sosialisasi Bela Negara

Untuk mendukung kegiatan Pembinaan Kader Bela negara (PKBN) berbagai program kegiatan/produk telah dihasilkan selama periode 2020 - 2022, antara lain :

1. Kegiatan Program TA. 2020
 - Iklan Layanan Masyarakat
 - Televisi : RCTI, iNews, GTV dan MNCTV
 - Radio : Trijaya FM dan Prambors
 - Media Sosial : Instagram dan Twitter



1. Talkshow Bela Negara

Inews TV, dalam acara Prime Show with Ira Koesno tanggal 18 Juni 2020 dengan Tema Bela Negara dalam menghadapi Covid-19 di New Normal dengan narasumber Mayjen TNI Sunaryo, SE (Staf Ahli Menhan Bid. Keamanan) dan Rachmat Indraja (Corporate Affairs Director JAPFA Comfeed)



Ini Talk Show adalah program talk show masa kini yang menghadirkan tamu-tamu yang seru, unik dan menginspirasi.

Ini Talk Show didukung oleh Sule sebagai Host, Andre Taulany sebagai Consultant-Host, Sas Widjanarko sebagai Om Sule, Anggika Bolsterli sebagai Asisten Rumah Tangga, Nunung sebagai tetangga, Haji Bolot sebagai Pak RT dan para pemeran-pemeran top lainnya.





Inews TV, dalam acara Call Me Mel tanggal 21 Juli 2020 dengan Tema Bela Negara dan Masa Depan anak bangsa dalam menyongsong era teknologi 4.0 dengan narasumber Brigjen TNI Domingus Pakel S.Sos.,M.,M. Si (Kapusdatin Kemhan) dan Danil (Pengajar Robotik di sekolah robot anak).



Dalam rangka HUT RI ke 75, tanggal 17 Agustus 2020 Wamenhan RI Sakti Wahyu Trenggono melakukan wawancara khusus dengan tema Bicara Bela Negara, Milenial, Hingga Maung Live on Facebook dan Youtube @uzoneindonesia.





Tanggal 24 Agustus 2020 Wamenhan RI Sakti Wahyu Trenggono menjadi narasumber dalam acara Okay Bos Trans 7 bersama Gitaris Slank Abdee Negara dengan tema Mengisi Kemerdekaan dengan Bela Negara.



Inews TV, dalam acara Call Me Mel tanggal 14 Juli 2020 dengan tema Bela Negara dalam melestarikan Ekosistem dengan narasumber Mayjen TNI Dr. rer. pol. Rodon Pedrason, MA (Dirjen Strahan) dan Herman Aga (Pegiat Pelestarian Lingkungan Kota Batu Jatim).



Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, meluncurkan studio ngopi daring Bela Negara, sebagai sarana silaturahmi komponen anak penggiat seni dan naravlog dengan penggiat industri pertahanan, melaksanakan dialog kebangsaan dan bela negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman bela negara generasi muda.

Melalui studio ngopi daring bela negara ini diharapkan dapat dijadikan inspirasi generasi milenial di era digital ini untuk mengangkat karya-karya anak bangsa sekaligus mengangkat nama Indonesia.

Program kegiatan Ngopi Daring Bela Negara



2. Kegiatan Non Program TA. 2020

Aksi Bela Negara Peduli Covid-19. Penyaluran makanan ready to eat bagi tenaga medis pada 25 rumah sakit di daerah Jabodetabek kerjasama antara Kementerian Pertahanan dengan Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Sumbangan 2500 potong ayam mentah dan 3000 butir telur bagi masyarakat terdampak Covid-19 di masa PSBB di wilayah Jabodetabek pada tanggal 25 April 2020. Sumbangan 2500 box Makanan siap saji bagi tenaga medis di 25 RS Rujukan Covid-19 di Jabodetabek pada tanggal 7, 12, 14, 19 dan 21 Mei 2020.



Penyerahan 1 Unit Truk Tangki Air 5000 Liter

Serah terima CSR PT. Lundin berupa bantuan 1 (satu) unit mobil truk tangki air kepada Kodim 0907/TRK Tarakan Kalimantan Utara, tanggal 23 Juni 2020



3. Kegiatan Program TA. 2021

- MoU antara Kementerian Pertahanan dengan K/L terkait tentang Bela Negara Tahun 2021



Rembuk Nasional Bela Negara Tahun 2021

Rembug Nasional Bela Negara Tahun 2021 ini bertajuk "Menyatukan Persepsi dan Optimalisasi Program Nasional Bela Negara (PKBN) dan Sinkronisasi Program Kebijakan PKBN Secara Masif dan Berkesinambungan", di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (24/03/2021)



Rakor Dan Konsolidasi KBN



Pemberian sertifikat & piagam Bela Negara Bagi masyarakat Eks Tim-Tim



Menhan menyematkan PIN Bela negara kepada Ex Pejuang TimTim
(Enrique Guterres)





KASUBDIT LINGDIK Sebagai Narasumber Pada Acara Workshop Aksi Kebangsaan Bagi Guru Sma Wilayah Dki Jakarta, Jawa Barat, Dan Banten Tanggal 26 Agustus 2021

Pada hari Kamis, 24/02/2022 Kementerian Pertahanan RI melalui Direktorat Bela Negara mengadakan acara Rakor/Lokakarya Kader Dan Fasilitator Bela Negara di Hotel Mercure Batavia, Jakarta. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha dan di dampingi Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto.



Pelaksanaan Kegiatan *Focus Group Discussion* Pengukuran Indeks Bela Negara Tahun 2022



Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto, melaksanakan Penandatanganan Kerjasama Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung dengan Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan, dihadiri oleh Dekan Fisip Universitas Lampung beserta jajaran civitas akademika dan dihadiri juga oleh Para Kasubdit Dit. Bela Negara, Kasubdit SDM Duk Sumdahan Kabid Perjanjian & Kerjasama Biro Hukum Setjen Kemhan dan APN.



Rapat mengenai Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pembinaan Dalam Pengabdian Sesuai Dengan Profesi



Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Bela Negara di Provinsi Lampung



Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Bela Negara di Provinsi Tanjung Pinang



Sosialisasi dan Diseminasi Kesadaran Bela Negara Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta T.A. 2022



Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Permenhan No. 8 Tentang Pedoman PKBN



Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Pengukuran Indeks Bela Negara Tahun 2022



Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Bela Negara di Provinsi Yogyakarta



Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Pengukuran Indeks Bela Negara Tahun 2022



Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Bela Negara di Provinsi Bali



Bimbingan Teknis Kepimpinan Berwawasan Kebangsaan / Bela Negara dan Berintegritas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Ketua DPB Se Kab. Penajam Paser Utara

5.4 Kegiatan Bela Negara di Lingkungan Pendidikan

1. Tahun Anggaran 2020

No.	KEGIATAN	PESERTA		TGL GIAT	TEMPAT
1	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara Lingkup Pendidikan di Prov. Kepulauan Riau	260	orang	17-18 NOV	Pemda Kepulauan Riau dan Ditjen Potan Kemhan (Video Convergence)
2	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara Lingkup Pendidikan di Kota Jayapura Prov. Papua	200	orang	11 & 12 NOV	Kantor Disdik Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Papua dan Ditjen Potan Kemhan (Video Convergence)
3	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara Lingkup Pendidikan di Kota Bitung Prov. Sulut	200	orang	26-27 Feb	Tuna Meeting Room Nalendra Kharisma Jl. Samuel Languyu No. 5A Kel. Winenet Link. I Kec. Bitung Tengah Kota Bitung Prov. Sulawesi Utara
4	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara Lingkup Pendidikan di Mamuju Prov, Sulbar	260	orang	10-11 NOV	Pemda Sulawesi Barat dan Ditjen Potan Kemhan (Video Convergence)
5	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara Lingkup Pendidikan di Prov. Lampung	260	orang	18-19 NOV	Kantor Disdik dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Ditjen Potan Kemhan (Video Convergence)
6	Penyusunan Permenhan Tentang Kurikulum Pembinaan Kesadaran Bela Negara	8	K/L	4 Bulan	Jakarta
7	Penyusunan Permenhan Tentang Modul Pembinaan Kesadaran Bela Negara	8	K/L	4 Bulan	Jakarta
8	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara melalui Iklan Layanan Masyarakat di Radio dan Media Sosial	Masyarakat		Jan-Des	Jakarta

2. Tahun Anggaran 2021

No.	KEGIATAN	PESERTA		TGL GIAT	TEMPAT
1	Kesepakatan Bersama (MoU) Kemhan dengan K/L terkait tentang Bela Negara	14	K/L	April - Agus	Jakarta
2	Penyusunan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara	11	K/L	April - Juni	Hotel and Resort Pullman Jakarta Central Park Podomoro City .11. Letjen S Parman 28 Jakarta
3	Penyusunan Permenhan tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara	7	K/L	April - Sept	Hotel Grand Mercure Jakarta, Kemayoran
4	Penyusunan Permenhan tentang Pengklasifikasian Kader Bela Negara	3	K/L	April - Juni	Hotel and Resort Pullman Jakarta Central Park Podomoro City
5	Penyusunan Modul Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dalam Bela Negara	2	K/L	April - Juni	Hotel Grand Mercure Jakarta, Kemayoran
6	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara melalui Iklan Layanan Masyarakat di Radio dan Media Sosial	Masyarakat		Jan-Des	Jakarta

JUMLAH DATA PESERTA KEGIATAN SUBDIT LINGDIK
TENTANG KEBIJAKAN PKBN



3. Tahun Anggaran 2022

NO	KEGIATAN	PESERTA		TGL GIAT	TEMPAT
1	Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah di Yogyakarta dan Palangkaraya				
	YOGYAKARTA	180	orang	2 - 3 Februari	Hotel Grand Mercure Yogyakarta Jl. Laksda Adisucipto no.80, Demangan Baru Caturtunggal Sleman Yogyakarta
	PALANGKARAYA	180	orang	16 - 17 Maret	Aquarius Boutique Hotel Jl. Imam Bonjol no.5 Kota Palangkaraya
2	Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Pembinaan Kesadaran				
	SUMBAR	200	orang	30 - 31 Maret	Kyriad Bumiminang Hotel Jl. Bundo Kandung No. 20-28 Padang
	BATAM	200	orang	18 - 19 Mei	Pacifik Palace Hotel .11. Duyung Sei Jodoh Pulau Batam Kepulauan Riau
3	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan didaerah Bali	200	orang	Jan - Des	Aston Denpasar Hotel 11. Gatot Subroto Barat No. 283 Pemecutan Kaja,Kec Denpasar Utara Kota Denpasar Bali
4	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara melalui Iklan Layanan Masyarakat	Masyarakat			Jakarta

5.5

Kegiatan Bela Negara di Lingkungan Pemukiman

1. Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara Pada Lingkup Pemukiman	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara Pada Lingkup Pemukiman di Kota Dumai Prov. Riau	11 - 13 Feb 2020	Grand Zuri Hotel	200 Orang - Ormas : 50 org - Pemuda : 50 org - Tomas : 40 org - Todat : 30 org - Toma : 30 org	
		Sosialisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Lingkup Pemukiman Secara Daring/Webinar/ Video Conference di Prov. Bima Nusa Tenggara	9 - 12 Nov 2020	Zoom Meeting	150 Orang - HMI: 42 org - PMII: 42 org - KNPI: 41 org - Ansor: 41 org - FKUB: 6 org - PWI: 41 org - K. Taruna: 87 Org	
		Sosialisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Lingkup Pemukiman Secara Daring/Webinar/ Video Conference di Prov. Jambi	12 - 13 Nov 2020	Zoom Meeting Ruang Rapat Gd. S. Suprpto Ditjen Potan	300 Orang - IMM : 40 org - FKPPi: 45 org - Cinta Tanah Air : 45 Org - FPK : 40 org - Forum Bela Negara: 50 org - Forum Putra Putri Jambi: 40 org - PMI Prov. Jambi: 40 org	
		Sosialisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Lingkup Pemukiman Secara Daring/Webinar/ Video Conference di Kota Sorong Prov. Papua Barat	16 - 19 Nov 2020	Zoom Meeting	150 Orang - HMI : 40 org - PMII : 45 org - KNPI : 45 org - Ansor : 40 org - FKUB : 50 org - PWI : 40 org - KNPI : 40 Org	

Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Sosialisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Lingkup Pemukiman Secara Daring/Webinar/ Video Conference di Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara	19 - 20 Nov 2020	Zoom Meeting	150 orang	7 ormas
	Rapat Koordinasi Organisasi Kader Bela Negara	Rapat Koordinasi Organisasi Kader Bela Negara Tingkat Pusat	25 Nov 2020	R. Rapat Abdi Negara Lt. 8 Gd. Suprpto Ditjen Potan	50 orang	

2. Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rapat Koordinasi Dan Konsolidasi Kader Bela Negara	Rapat Koordinasi Dan Konsolidasi Kader Bela Negara Seluruh Indonesia	30 - 31 Maret 2021	Hotel Grand Mercure Harmoni	156 Orang - FBN : 36 org - FKBN: 17 org - PKBN: 17 org - ASKARA: 1 org - RCBN: 15 org - YBB: 15 org - GERCIN : 15 org - SENKOM : 17 org - PPBN : 17 org - KONAS MENWA: 3 org - IARMI: 3 org	

Tahun Anggaran 2021

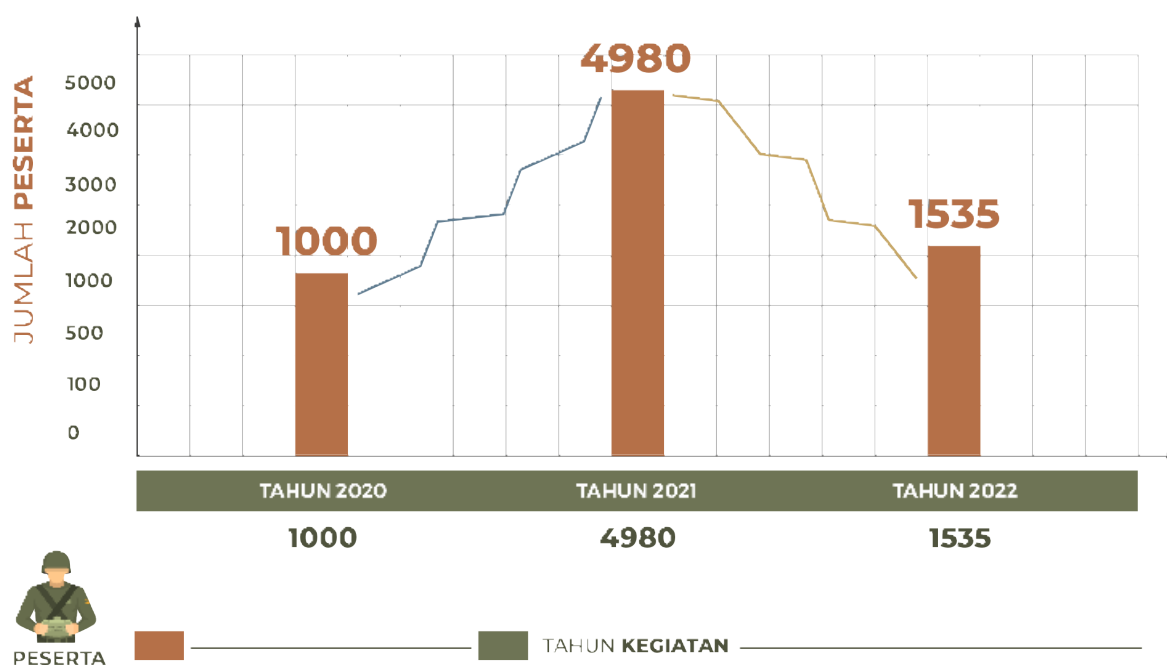
NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
2.	Sosialisasi PKBN dan Pemberian Piagam Penghargaan dan Pin Patriot Bela Negara Kepada Eks Pejuang Timor Timur	Pemberian Piagam Penghargaan dan Pin Patriot Bela Negara Kepada Eks Pejuang Timor Timur	18 -19 Mei 2021	Gedung Flamenggo Lanud Eltari	330 orang	
		Sosialisasi PKBN dan Pemberian Piagam Penghargaan dan Pin Patriot Bela Negara Kepada Eks Pejuang Timor Timur	3 - 4 Juni 2021	Lapangan Upacara Pemkab. Kupang Gedung Aula Pemkab. Kupang	3.241 orang	
3.	Penyusunan Buku Index Bela Negara Tahun 2021	Giat Rapat Penyusunan Buku Indeks Bela Negara di Kota Medan	6 - 7 Sep 2021	Hotel Bolenia Medan	100 orang	
		Giat Rapat Penyusunan Buku Indeks Bela Negara di Kupang	14 - 15 Okt 2021	Hotel Silvia Kupang	100 orang	
		Giat Rapat Penyusunan Buku Indeks Bela Negara di Semarang	26 - 27 Okt 2021	Hotel Horison Semarang	100 orang	
		Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Indeks Pembinaan Kesadaran Bela Negara	23 - 24 Nov 2021	Hotel Mercure Harmoni	22 orang	

3. Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rembuk Nasional Bela Negara	Rembuk Nasional Bela Negara	25 - 26 Jan 2022	Hotel Pullman Central Park	130 orang	
2.	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara di Prov. Lampung	21 - 23 Feb 2022	Hotel Novotel Jl. Gatot Subroto No. 132, Bandar Lampung	150 orang - Pondok Pesantren: 75 org - Ormas: 75 Org	
		Sosialisasi Kesadaran Bela Negara Lingkup Masyarakat di Prov. Banten	21 - 22 Mar 2022	Hotel Horison Ultima Ratu Jl. KH Abdul Hadi No. 66, Kota Serang	150 orang - Pondok Pesantren: 75 Org - Ormas: 75 Org	
3.	Sosialisasi Permenhan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Sosialisasi Permenhan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara	9 Juni 2022	Hotel Mangga 2 Square	125 orang - Kementerian - Ormas	
4	Penyusunan Buku Indeks Bela Negara	Kegiatan Rapat Penyusunan Buku Indeks Bela Negara Kota Kendari	21 - 23 Juni 2022	Hotel Horison	140 Orang	
		Kegiatan Rapat Penyusunan Buku Indeks Bela Negara Kota Samarinda	22 - 24 Juni 2022	Hotel Grand Mercure	140 Orang	

Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Kegiatan Rapat Penyusunan Buku Indeks Bela Negara Kota Banjarmasin	28 - 30 Juni 2022	Hotel Grand Mercure	140 orang	
		Kegiatan Rapat Penyusunan Buku Indeks Bela Negara Kota Ambon	22 - 24 Juli 2022	Hotel Santika	140 Orang	
		Kegiatan Rapat Penyusunan Buku Indeks Bela Negara Kota Bandung	22 - 24 Juli 2022	Hotel Kytos	140 orang	
		Kegiatan Rapat Penyusunan Buku Indeks Bela Negara Kota Surabaya	29 Juni s/d 1 Juli 2022	Hotel Grand Mercure	140 orang	
		Kegiatan Rapat Penyusunan Buku Indeks Bela Negara Kota Aceh	6 - 8 Juli 2022	Hotel Grand Nangroe Aceh	140 orang	
5	Web Bela Negara	Pengembangan Web Bela Negara	31 Maret s/d 15 Desember 2022	https:// belanegara.org		

JUMLAH DATA PESERTA KEGIATAN SUBDIT LINGKIM
TENTANG KEBIJAKAN PKBN

5.6

Kegiatan Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan

1. Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sosialisasi Lingkup Pekerjaan di	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara bagi Lingkup Pekerjaan	19 - 20 Feb 2020	Meeting Room Hotel Ros-In Yogyakarta	200 orang	
	a. Kulonprogo (DIY)					
	b. Bontang (Kaltim)	Pemberian Piagam Penghargaan dan Pin Patriot Bela Negara Kepada Eks Pejuang Timor Timur	12 - 13 Mar 2020	Ball Room Hotel Tiara Surya Kota Bontang	200 orang	
	c. Kepulauan Belitung (Babel)	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara bagi Lingkup Pekerjaan secara Daring/ Webinar/Video Conference	11 - 12 Nov 2020	Kesbangpol Babel	330 orang	
	d. Palangkaraya (Kalteng)		16 - 17 Nov 2020	Kesbangpol Prov. Kalteng	330 orang	
2.	Wasev TMMD	Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 108 TA. 2020	22 - 24 Nov 2020	Kodim 0622/Kab Sukabumi, Korem 061/SK, Kodam III/ Siliwangi	25 orang	
	a. Wasev TMMD Ke 108					
	b. Wasev TMMD Ke 108					
	c. Wasev TMMD Ke 109	Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD ke 109 TA. 2020	26 - 28 Nov 2020	Kodim 0701/ Banyumas, Korem 071/Wijaya Kusuma, Kodam IV Diponegoro	631 orang	
	d. Wasev TMMD Ke 108	Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 109 TA. 2020	22 - 24 Nov 2020	Kodim 0815/ Mojokerto, Korem 082/CPYJ, Kodam V/Brawijaya	25 orang	

2. Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rembug Nasional TA. 2021	Rembug Nasional Bela Negara	24 s.d 25 Maret 2021	Ball Room Pullman Hotel Central Park Jakarta	200 orang	
2.	Wasev TMMD TA. 2021					
a.	Wasev TMMD Ke-110 TA. 2021	Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 110 TA. 2021	24 - 26 Maret 2021	Kantor Kodim 0101/BS kab. Aceh Besar Kec. Indrapuri, Desa Bueng Kabupaten Aceh Besar Prov. NAD, Kodam IM	25 orang	
b.	Wasev TMMD Ke-110 TA. 2021	Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 110 TA. 2021	16 - 17 Nov 2020	Kesbangpol Prov. Kalteng	330 orang	
c.	Wasev TMMD Ke-110 TA. 2021	Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 110 TA. 2021	17 - 19 Maret 2021	Kantor Kodim 0603/Lebak, Kab. Lebak Prov. Banten Kodam III/ Siliwangi	25 orang	
d.	Wasev TMMD Ke-110 TA. 2021	Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 110 TA. 2021	24 - 26 Maret 2021	Kantor Kodim 0714/Salatiga, Kota Salatiga Prov. Jateng Kodam IV/ Diponegoro	25 orang	
e.	Wasev TMMD Ke-110 TA. 2021	Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 110 TA. 2021	22 - 24 Maret 2021	Kantor Kodim 0822/ Bondowoso, kab. Bondowoso Prov. Jatim Kodam V/ Brawijaya	25 orang	
f.	Wasev TMMD Ke-110 TA. 2021	Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 110 TA. 2021	15 s.d 17 Maret 2021	Kantor Kodim 1008/TJG, Kab. Tabalong, Prov. Kalsel, Kodam Mulawarman	25 orang	

Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
	g. Wasev TMMD Ke-110 TA. 2021	Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 110 TA. 2021	15 s.d 17 Maret 2021	Kantor Kodim 1617/ Jembrana, Kab. Jembrana. Prov. Bali, Kodam IX/ Udayana	25 orang	
	h. Wasev TMMD Ke-110 TA. 2021	Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 110 TA. 2021	24 s.d 26 Maret 2021	Kantor Kodim 1201/ Mempawah, Kab. Landak Prov. Kalbar, Kodam XII/ Tanjungpura	25 orang	
	i. Wasev TMMD Ke-110 TA. 2021	Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 110 TA. 2021	16 s.d 17 Maret 2021	Kantor Kodim 1409/Gowa, Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara. Kodam XIV/ Hasanuddin	25 orang	
3.	Wasev TMMD TA. 2021					
	a. Wasev TMMD Ke-111 TA. 2021	Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 111 TA. 2021	7 - 9 Juli 2021	Kantor Kodim 0204/ Deliserdang, Kab. Deli Serdang Prov. Sumut, Kodam BB/ Bukit Barisan	25 orang	
		Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 110 TA. 2021	30 Juni s.d 2 Juli 2021	Kantor Kodim 04401/Musi Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel, Kodam II/ Sriwijaya	25 orang	
		Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 111 TA. 2021	5 s.d 7 Juli 2021	Kantor Kodim 0615/ Kuningan, Kab. Kuningan Prov. Jabar, Kodam III/ Siliwangi	25 orang	

Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 111 TA. 2021	30 Juni s.d 2 Juli 2021	Kantor Kodim 0825/ Banyuwangi, Kab. Banyuwangi Prov. Jatim, Kodam V/ Brawijaya	25 orang	
		Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 111 TA. 2021	23 - 25 Juli 2021	Kantor Kodim 0828/ Sampang, Kab. Sampang Prov. Jatim Kodam V/ Brawijaya	25 orang	
		Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 111 TA. 2021	28 - 30 Juni 2021	Kantor Kodim 1009/ Palahari kab. Tanah Laut, Prov. Kalsel. Kodam VI/ Mulawarman	25 orang	
		Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 111 TA. 2021	30 Juni s.d 2 Juli 2021	Kantor Kodim 1620/Lombok Tengah Prov. NTB, Kodam IX/Udayana	25 orang	
		Wasev Kemhan dalam Rangka TMMD ke 111 TA. 2021	30 Juni s.d 2 Juli 2021	Kantor Kodim 1207/BS, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat Kodam XII/ Tanjungpura	25 orang	
		Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 111 TA. 2021	23 - 25 Juni 2021	Kantor Kodim 0510/Tiga Raksa Kab. Tangerang Kec. Tangerang, Desa Jambe. Prov. Banten Kodam Jaya/ Jakarta	25 orang	

Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 111 TA. 2021	30 Juni s.d 2 Juli 2021	Kantor Kodim 0108/Aceh Tenggara, Kab. Aceh Tenggara Prov. NAD Kodam IM/ Iskandar Muda	25 orang	
4.	Wasev Kemhan TMMD Ke 112 TA. 2021	Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 112 TA. 2021	6 s.d 8 September 2021	Kantor Kodim 0207/Kab. Simalungung Prov. Sumatera Utara Kodam BB/Bukit Barisan	25 orang	
		Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 112 TA. 2021	29 Sep s.d 1 Okt 2021	Kantor Kodim 0621/Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Kodam III/ Siliwangi	25 orang	
		Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 112 TA. 2021	20 s.d 22 September 2021	Kantor Kodim 0818/Kab. Malang. Kec. Sawangan Kab. Malang Prov. Jawa Timur. Kodam V/ Brawijaya	25 orang	
		Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 112 TA. 2021	5 - 7 Okt 2021	Kantor Kodim 1304/ Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Kec. Suwawa Timur Desa Tulabolo Prov. Sulawesi Utara. Kodam XIII/Merdeka	25 orang	

Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 112 TA. 2021	5 - 7 Okt 2021	Kantor Kodim 1304/ Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Kec. Suwawa Timur Desa Tulabolo Prov. Sulawesi Utara. Kodam XIII/ Merdeka	25 orang	
		Sosialisasi PKBN melalui Wasev TMMD Ke 112 TA. 2021	22 - 24 Sep 2022	Kantor Kodim 0118/ubulussalam, Kec. Longkib Kota ubulussalam, Prov. NAD, Kodam IM/ Iskandar Muda	25 orang	
5.	Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Aksi Bela Negara pada Peringatan Hari Bela Negara ke 73 TA. 2021	Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara	18 Des 2021	GOR M. Yamin Kota Payakumbuh, Prov. Sumbar	350 orang	
			19 Des 2021	Gedung Museum PDRI Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumbar	350 orang	
6.	Kampanye Bela Negara	Sosialisasi Bela Negara Digital Lintas Komunitas	Periode 1 - 15 Agus 2021	Akun Medsos Instagram Lintas Komunitas	<i>Follower Instagram Lintas Komunitas</i>	
	Ngopi Daring Bela Negara	Episode 1: Mental Health, Chek!	6 Agus 2021	Studio Ngopi Daring Lt. 8 Ditjen Pothan Kemhan	Pengguna/ Penonton Youtube, Kemhan RI dan Ngopi Daring Bela Negara, Instagram, Tiktok dan Media Sosial lainnya.	

Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Episode 2 : UMKM Yuk Bisa Yuk!	12 Agus 2021	Studio Ngopi Daring Lt. 8 Ditjen Pothan Kemhan	Pengguna/ Penonton Youtube, Kemhan RI dan Ngopi Daring Bela Negara, Instagram, Tiktok dan Media Sosial lainnya.	
		Episode 3 : Spesial Kemerdekaan RI ke 76	19 Agus 2021			
		Episode 4 : MABA VS EVERYBODY	31 Agus 2021			
		Episode 5 : Bela Negara Agnes Mo	3 Sep 2021			
		Episode 6 : Aku, Konten dan Bela Negara	9 Sep 2021			
		Episode 7 : Ya Wanita Juga Bisa	16 Sep 2021			
		Episode 8 : Usaha Mandiri Untuk Semua	22 September 2021			
		Episode 9 : Edisi Spesial Hari Kesaktian Pancasila	1 Oktober 2021			
		Episode 10 : Semangat Komcad untuk Indonesia	7 Oktober 2021			
		Episode 11 : Muda Berkarya di Era 4.0	28 Oktober 2021			
		Episode 12 : Pahlawan Zaman Now	11 November 2021			

3. Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rakor/Lokakarya	Rakor/Lokakarya Kader dan Faslitator Bela Negara TA. 2022	23 - 24 Feb 2022	Ball Room Mercure Batavia Jakarta	73 orang	
2.	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara	Sosialisasi Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pekejaan di Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau TA. 2022	23 s.d 24 Maret 2022	Ball Room Hotel Aston Kota Tanjung Pinang	150 Orang	
3.	Penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan	Penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai Profesi TA. 2022	23 - 24 Mei 2022	Aula Bela Negara Gd. R. Soeprapto Lt. 8 Ditjen Pothan Kemhan	25 orang	Rapat Draft Awal
			7 - 8 Juni 2022	R. Tulip II Lt. 7 Hotel Grand Mercure Kemayoran	25 orang	Rapat Pokja Perumusan
			16 - 17 Juni 2022	Aula Bela Negara Gd. R. Soeprapto Lt. 8 Ditjen Pothan Kemhan	25 Orang	Rapat Pokja Finalisasi
4.	Kampanye Bela Negara	Ngopi Daring Bela Negara TA. 2022				
		Episode 1 : Bela Negara VS Pandemi	4 Mar 2022	Studio Ngopi Daring Lt. 8, Ditjen Pothan Kemhan	Pengguna/ Penonton Youtube, Kemhan RI dan Ngopi Daring Bela Negara, Instagram, Tik Tok dan Media Sosial lainnya	
		Episode 2 : Sikap Bela Negara di Bulan Puasa	1 April 2022			
		Episode 3 : Emansipasi Masa Kini	22 April 2022			

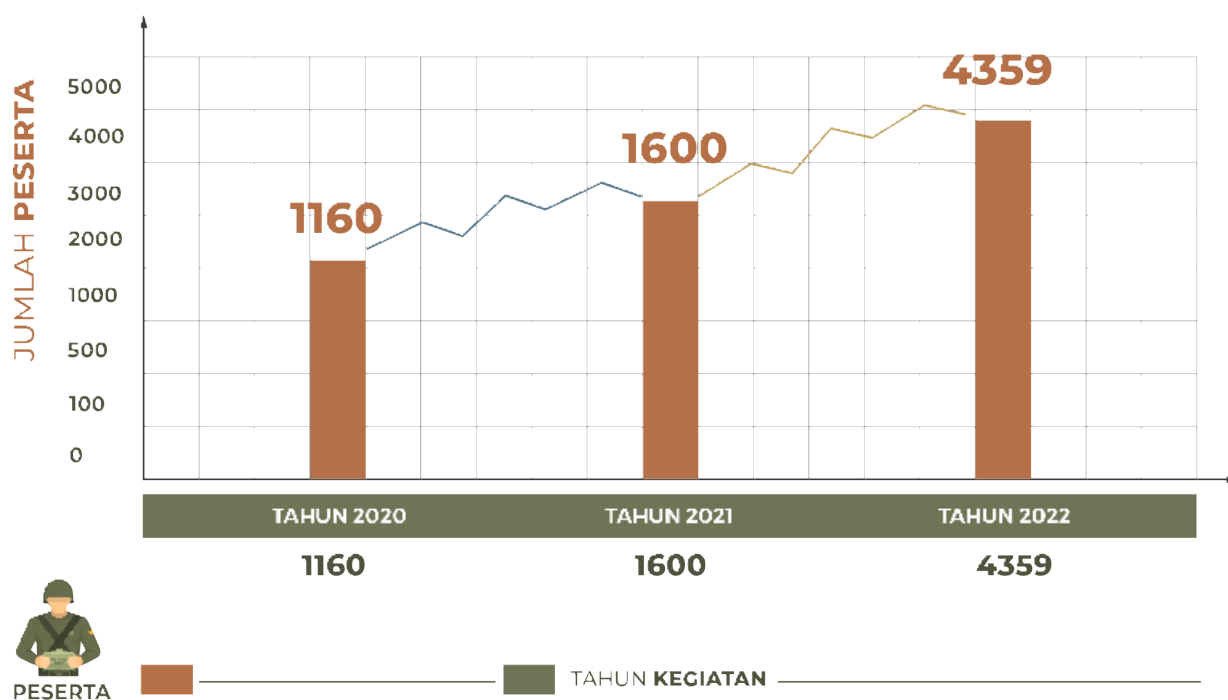
Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Episode 4 : Bangkit dan Tangguh, Generasiku!	20 Mei 2022			
		Episode 5 : Aku Pancasila, Aku Indonesia	15 Juni 2022			
		Episode 6 : Indonesia Emas 2045, Bukti Bela Negara	19 Juli 2022			
		Episode 7 : Merajut Prestasi Anak Bangsa	25 Juli 2022			
		Episode 8 : Kerajaan Dulu dan Kini	16 Agus 2022			
		Episode 9 : Komcad Hadir Untuk Negeri	8 Sep 2022			
5.	Kampanye Bela Negara	Digital Lintas Komunitas Seluruh Indonesia TA. 2022				
		1. Indonesia melayani	21 - 22 Jan 2022	Webinar	3554 Partisipan Asqi layanan Publik, Nakes/ Perawat, Satpam, Pelaku UMKM, <i>Contact center</i> .	
		2. Superhero Digital dengan melawan HOAX di Media Sosial	13 Agus 2022	Webinar, Kampus Poltek Bima Bekasi	507 Partisipan ASQI layanan Publik, Nakes/ Perawat, Satpam, Pelaku UMKM, <i>Contact center</i>	

Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
		3. Menjadi Generasi Kreatif untuk Bangsa	16 Agus 2022	Webinar, Skretariat KONI Tangel	ASQI layanan Publik, Nakes/Perawat, Satpam, Pelaku UMKM, Contact center	
		Konten Menyapa Komunitas Mahasiswa di Website anaksekarang.com	10 Mei s.d 15 Ags 2022	Instagram anaksekarang.com	1. Instagram 2. Facebook 3. Tiktok 4. Medsos Lainnya	

JUMLAH DATA PESERTA KEGIATAN SUBDIT LINGJA TENTANG KEBIJAKAN PKBN





Upacara memperingati Hari Bela Negara ke-74

Pada hari Senin 19 Desember 2022, Dirjen Potan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha mengikuti Upacara memperingati Hari Bela Negara ke 74 TA. 2022 yang mengangkat tema “Bangkit Bela Negaraku Jaya Indonesiaku”. Kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Apel Bhineka Tunggal Ika ini selaku Inspektur upacara Wamenhan RI M. Herindra dan diikuti oleh Pejabat Eselon I, II, III lingkungan Kemhan serta perwakilan Satker dan Ormas Bela Negara.







DIREKTORAT TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN



6

Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan

Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan selanjutnya disebut Dit Tekindhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan disebut Dir Tekindhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang pembinaan teknologi informasi komunikasi dan industri pertahanan.

Dalam kurun waktu 2021-2022 Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan telah mengalami pergantian pimpinan yaitu:



Laksma TNI Sri Yanto, S.T.
Juli 2019 sd Des 2021



Marsma TNI Ir. Wajariman, M.Sc.
Des 2021 sd sekarang

Dit Tekindhan terdiri atas:

- Subdirektorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan
- Subdirektorat Industri Pertahanan
- Subdirektorat Promosi dan Kerjasama
- Subdirektorat Perizinan
- Subdirektorat Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Offset
- Subbagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan Fungsional

6.1 Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan Nasional

Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk membangun Industri Pertahanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Alpalhankam secara mandiri. Bahkan pada periode pemerintahan kedua presiden telah menetapkan jabatan wamenhan yang salah satu tugasnya adalah untuk mendorong dan memajukan Indhan melalui kolaborasi antara Indhan BUMN dan Indhan BUMS. Ditjen Potan Kemhan memiliki 6 (enam) program untuk mewujudkan kemandirian tersebut serta untuk menjadikan Industri Pertahanan sebagai bagian penting dari mata rantai pasok (*Global Supply Chain*) Alpalhankam (alat peralatan pertahanan keamanan) dunia.

Produk Regulasi

Untuk penguatan keberpihakan pemerintah kepada Industri pertahanan dalam negeri, pemerintah dari 2015-2019 telah menetapkan produk regulasi untuk mendorong kemajuan indhan yang terdiri dari: PP 76 tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam

Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri, PP 141 tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan dan Perpres 27 tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Pengadaan Jangka Panjang.

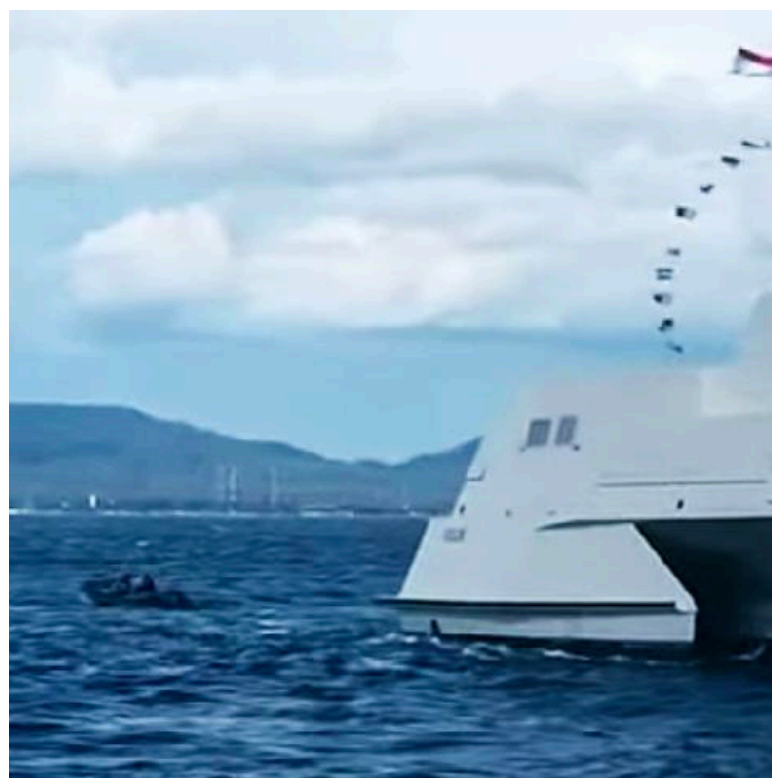
Penetapan Industri Pertahanan

Dari tahun 2020 hingga Desember 2022, Kementerian Pertahanan RI telah menetapkan 73 menjadi 214 Industri, baik BUMN maupun BUMS sebagai Industri Pertahanan dengan rincian sebagai berikut :

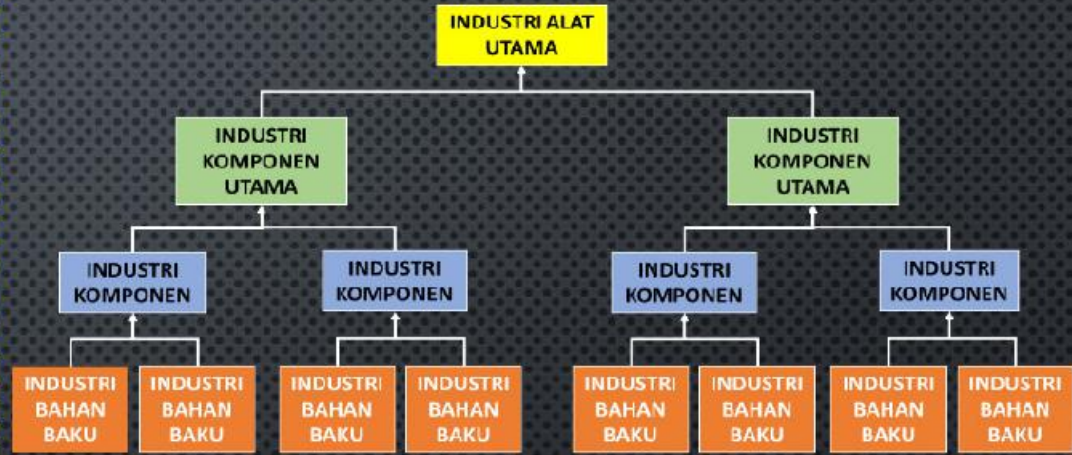
1. Industri Pertahanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebanyak 10 perusahaan, yaitu PT. Pindad (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), PT. LEN Industri, PT. Dahana, PT. Dok Kodja Bahari (PT. DKB), PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT. INTI), PT. Garuda Maintenance Facilities (PT. GMF), PT. Sucofindo dan PT. Merpati Maintenance Facility. Dari 9 Indhan BUMN, 3 (tiga) diantaranya telah ditetapkan sebagai Lead Integrator (Pemadu Moda) untuk Alutsista sesuai matra yaitu : PT. PAL untuk Alutsista Matra Laut, PT. DI untuk Alutsista Matra Udara dan PT. Pindad untuk Alutsista Matra Darat.
2. Industri Pertahanan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sebanyak 104 perusahaan dengan berbagai macam kompetensi dan berperan pada tier 2 hingga tier 4.

Tonggak baru dalam layanan pendaftaran dan penetapan industri pertahanan di tahun 2021 adalah diluncurkannya Sistem Online Single Submission Coss untuk Pendaftaran Industri Pertahanan, dan Badan Usaha Bahan Peledak. Sistem Online tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan yang terintegrasi dengan Kementerian lain. Dengan sistem online pemohon lebih mudah melakukan registrasi ataupun mendapatkan informasi/data kegiatan lain yang dapat dipantau proses kemajuannya secara online.

Perbaikan kualitas layanan ini menjadi bagian dari keberhasilan Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Dittekindhan. Ditjen Potan Kemhan memperoleh Anugerah Zona Integritas 2022 untuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB sebagai perwakilan dari Kementerian Pertahanan



PERTAHANAN



- Industri Alat Utama : 123 Indhan
- Industri Komponen Utama : 70 Indhan
- Industri Komponen : 20 Indhan
- Industri Bahan Baku : 1 Indhan

INDHAN BUMS



6.2

Implementasi Kebijakan Kandungan Lokal, Offset dan Alih Teknologi

1. Kebijakan pemerintah yang mendukung bahwa pembelian Alpalhankam sebagai investasi merupakan wujud pelaksanaan kebijakan Offset, yang secara tegas disebutkan pada Pasal 43 ayat (3) UU 16/2012 “Dalam hal Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam negeri belum dapat dipenuhi oleh Industri Pertahanan, Pengguna dan Industri Pertahanan dapat mengusulkan kepada KKIP untuk menggunakan produk luar negeri dengan pengadaan melalui proses langsung antar pemerintah atau kepada pabrik. Dan pada ayat 4 disebutkan Syarat menggunakan Alpalhankam produk luar negeri :
 - a. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan belum atau tidak bisa dibuat di dalam negeri; (Berdasarkan kebutuhan operasional, Pengguna dan Industri Pertahanan dapat bersama-sama merumuskan spesifikasi teknis Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan)
 - b. mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan (Partisipasi Industri Pertahanan merupakan pembelian dengan mekanisme imbal dagang, termasuk offset.)
 - c. kewajiban alih teknologi;
 - d. adanya imbal dagang, kandungan lokal dan/atau Offset paling rendah 85% (delapan puluh lima persen);

IDKLO sebagai governing rules yang memiliki posisi strategis dalam upaya mewujudkan kemandirian Alpalhankam dan pengembangan industri industri pertahanan. IDKLO diterapkan pengadaan Alpalhankam dengan konsep utama keseimbangan perdagangan dengan pengembalian devisa melalui IDKLO dengan nilai yang sepadan harga Kontrak pembelian alutsista.

Pelaksanaan IDKLO tidak boleh terpisahkan dari kebutuhan Alpalhankam pengguna, yang berfungsi sebagai acuan pendefinisian teknologi strategis yang hendak dikuasai melalui riset dan kerja sama produksi maupun pengembangan alutsista sebagai peran penting IDKLO.

Tujuan strategis IDKLO adalah kemandirian industri pertahanan, pengembangan industri, dan manfaat ekonomi nasional. Oleh karena itu perencanaan IDKLO tidak boleh dipisahkan dari rencana kebutuhan pengguna dan rencana pengembangan kemampuan teknologi dari basis Industri Pertahanan.

Kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa pembelian alpalhankam sebagai investasi pertahanan pada prinsipnya didukung oleh kebijakan IDKLO. Obligasi Offset diupayakan semaksimal mungkin untuk peningkatan kemampuan industri pertahanan, lembaga litbang dalam mendukung kemandirian disamping potensi ekonomi dengan mengembalikan biaya pekerjaan/jasa yang dapat di suplai oleh industri lokal dalam proyek pembelian Alpalhankam.

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 pasal 43 maka pengadaan Alpalhankam yang dibeli dari luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengikutsertakan industri pertahanan dalam pelaksanaannya;
- b. Berkewajiban melaksanakan alih teknologi kepada industri pertahanan;
- c. Memberikan IDKLO minimal 85 % (delapan puluh lima persen) dari harga kontrak yang didalamnya termasuk kandungan lokal/dan atau Offset minimal 35%;

Implementasi Ofset atau IDKLO mulai diberlakukan secara terbatas pada Renstra 2010-2015 dan berlanjut secara penuh Renstra 2015-2019 dan Renstra 2020-2024. Total nilai yang dari Kebijakan Ofset (KLO) sampai dengan tahun 2022 sebesar USD 5.191.356.281 dengan jumlah 39 kontrak.

Tabel 1 capaian jumlah dan Value KLO

Renstra	Jumlah	Nilai KLO (USD)
2010-2014	4	27,253,624
2015-2018	25	2,258,043,806
2019-2022	10	2,906,058,851
Total	39	5.191.356.281

Kegiatan IDKLO untuk tahun 2022 terdiri dari kegiatan monitoring pelaksanaan KLO, penyelesaian KLO Renstra 2015-2019, penyusunan struktur dan Offset Agreement kontrak Renstra 2020-2024. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- KLO renstra 2015-2019 (lihat tabel 2), kegiatan yang dilaksanakan berupa:
 - Penerbitan Offset Completion untuk KLO Radar dan Senjata Pesawat T-50i, FFBNW Kapal PKR 10514.
 - Monitoring pelaksanaan KLO berupa pemberangkatan training ke LN, monev pekerjaan Kandungan Lokal dan evaluasi pelaksanaannya.

Tabel 2. KLO Renstra 2015-2019

NO.	Nama KLO	PENYEDIA	NEGARA	VALUE	KET
1	Sistem Interoperability Kodak	ISI HELLAS	Yunani	86,70%	Proses
2	Alpernika1	Crossland Int'l FZE	UAE	88,13%	Proses
3	Radar Pasif	ERA, as	Ceko	85,61%	Selesai 2021
4	Alat Sandi	Crypto AG	Swiss	85,10%	Selesai 2021
5	Rudal (Starstreak)	Thales UK	Inggris	86,55%	Proses
6	Meriam 155/GS	Nexter System	Perancis	85,39%	Proses
7	Roket dan Rantis AVRMD dan AVFCU	Avibras	Brazil	85,37%	Selesai 2021
8	Alat Penyeberangan Apmphibius Pontoon Set	Excalibur	Ceko	85,21%	Selesai 2020
9	Rudal (Starstreak) II	Thales UK	Inggris	85,14%	Proses
10	Missile MLRS Avibras/Astros II	Avibras	Brazil	85,14%	Selesai 2021
11	FFBNW Kapal PKR 10514	DSNS	Belanda	89,17%	Selesai 2022
12	Upgrade FCS SSM Exocet MM-40	MBDA	Perancis	85,46%	Proses
13	Meriam Kal 40 mm	Leonardo S.p.A.	Italia	70,36%	Proses
14	Meriam Kal 30 mm	Leonardo S.p.A.	Italia	71,34%	Proses
15	Torpedo Kapal Selam (Blackshark)	Leonardo S.p.A.	Italia	115,00%	Proses
16	Kapal Mine Counter Measure	A&R	Jerman	111,00%	Proses
17	Rudal Exocet MM-40 Block 3 VL Mica	MBDA	Perancis	88,10%	Proses
18	Rudal SAM Kapal MRLF	MBDA	Perancis	87,27%	Proses

19	Rudal Jarak Sedang Multifungsi Pam Ibukota	Kongsberg	Norway	85,95%	Selesai
20	PSU dan Dukungannya	Rheinmetal	Swiss	85,14%	Selesai
21	Pesawat G-120 TP dan Dukungannya	Grob	Jerman	85,22%	Selesai
22	UAV, Peralatan Operasi dan Dukungannya	ALIT	China	86,80%	Selesai
23	Radar dan Senjata T-50i dan Pemasangannya	KAI	Korsel	85,07%	Selesai
24	Pesawat KT-1B dan Dukungannya	KAI	Korsel	85,17%	Selesai
25	Pesawat C-130J	Lockheed Martin	USA	96,10%	Proses

b. KLO Renstra 2020-2024

Pada Renstra 2020-2024, proses penyusunan IDKLO pengadaan Alutsista oleh Penyedia dari Luar Negeri, pelaksanaannya mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dari Daftar Pengadaan Alutsista yang tertera Dalam PSP telah dilaksanakan pembahasnan dalam rangka penyusunan Struktur KLO sebanyak 10 Pengadaan dari luar negeri terdiri dari 2 pengadaan Mabes TNI, 5 Pengadaan Matra Udara, 2 Matra Laut dan 1 Matra Darat. Total nilai KLO mencapai USD. 2.906.058.851

Struktur KLO dan Offset Agreement yang telah disusun sebagai berikut (lihat tabel 3):

- Alpernika
- Senapan Serbu 5,56 mm Marinir (AKM)
- Kesisteman MLRS(ITBM KHAN)
- Kapal BHO
- Pesawat LIFT
- Pesawat MRTT
- Pesawat MRCA Rafale (6)
- Radar GCI
- Medium Range Air Defence ADS-400
- FFBNW OPV

Tabel 2. KLO 2020-2022

NO.	OFFSET PENGADAAN	PENYEDIA	NEGARA	MATRA	%KLO	NILAI
1	Alpernika2	Secucom	UAE	MBTNI	94,07%	26.340.000
2	Senapan Serbu 5,56 mm Marinir (AKM)	CSG	Ceko	MBTNI	89,11%	11.506.774
3	Kesisteman MLRS(ITBM KHAN)	CSG	Ceko	TNI AD	89,11%	167.943.077
4	Kapal BHO	A&R	Jerman	TNI AL	85,14%	127.710.000
5	Pesawat LIFT dan Dukungannya	KAI	Korsel	TNI AU	95,16%	228.384.000
6	Pesawat MRTT	Airbus	Spanyol	TNI AU	86,00%	416.240.000
7	Pesawat MRCA Rafale (6)	Dassault Aviation	Perancis	TNI AU	90,77%	1.016.624.000
8	Radar GCI dan Dukungannya	CSG	Ceko	TNI AU	89,11%	320.796.000
9	MEDIUM RANGE AIR DEFENCE ADS-400	CSG	Ceko	TNI AU	89,11%	409.906.000
10	FFBNW OPV	IOS PTE Ltd	Singapore	TNI AL	90,35%	180.609.000
						2.906.058.851

6.3 Peningkatan Kerjasama Internasional

Ditjen Potan Kemhan melaksanakan Kerjasama Internasional melalui dua kegiatan yaitu Defence Industry Cooperation Meeting (DICM) antara Indonesia dan negara Turki, China, Rusia dan Korea Selatan yang dilaksanakan secara resiprokal bergantian setiap tahunnya guna menghasilkan Kerjasama dalam bidang Supply Chain, Joint Production, Joint Venture, Joint Development, Joint Investment, Transfer Of Technology (ToT), Overhaul, Refurbishment, Modification antara industri pertahanan Indonesia dan Industri Pertahanan ke empat negara tersebut. Pelaksanaan DICM selama kurun waktu tahun 2020 s.d. 2021 dilaksanakan secara Video Conference.



DICM RI - Korea ke 8



DICM RI - Turki ke 9



DICM RI - Korea ke 9



DICM RI - Turki ke 10

Untuk DICM antara RI-China dan RI-Rusia dilaksanakan secara Correspondensi yaitu saling berkirim progress List of Action dari pertemuan tahun sebelumnya.

Kerjasama industri pertahanan lainnya yaitu melalui Forum Kerjasama Internasional Sub **Committee** Industri Pertahanan melalui program kerja Dit Kersinhan Ditjen Strahan Kemhan, dalam kegiatan sub committee ini diadakan working group kedua negara, dimana untuk working group bidang industri pertahanan dipimpin oleh Dit Tekindhan Ditjen Potan Kemhan dan beranggotakan Kapusalpalhan Baranahan Kemhan serta Dit Kersinhan Ditjen Strahan Kemhan. Dalam working group ini membahas tentang potensi Kerjasama yang dapat dilaksanakan oleh kedua negara yaitu *Supply Chain, Joint Production, Joint Venture, Joint Development, Joint Investment, Transfer Of Technology (ToT), Overhaul,*

Refurbishment, Modification. Dalam working group ini akan menghasilkan *Minutes of Meeting* (MoM) yang ditanda tangani oleh tiap – tiap ketua *working group*. Hasil dari MoM ini yang akan dijadikan pedoman bagi kedua negara melaksanakan aksinya. Beberapa Sub *committee* bidang Industri Pertahanan yang pernah diikuti Dit Tekindhan Ditjen Potan dalam kurun waktu tahun 2020 s.d. 2021 yaitu :

1. RI-Belanda :
NIST (Netherland Indoensia Strategic Talk)
2. RI-Prancis :
IFDD (Indonesia French Defence Dialogue)
3. RI-Australia :
IADSD (Indonesia Australia Defence Strategic Dialogue)



IADSD RI-Australia



JDSCC RI-Philipina



NIST RI-Belanda



IFDD RI-Prancis

Sedangkan Kerjasama Sub *Commitee* bidang Industri Pertahanan lainya yaitu :

1. RI-Inggris :
JDCD (Joint Defence Cooperation Dialogue)
2. RI-Polandia :
JDCC (Joint Defence Cooperation Committee)
3. RI-Germanny :
IGSPST (Indonesia Germany Security Policy Staff Talks)
4. RI-USA :
IUSSD (Indoenesia United States Security Dialogue)
5. RI-India :
JDCC (Joint Deefence Cooperation Committee)
6. RI-Italy :
JCDC (Joint Committee for Defence Cooperation)

7. RI-Pakistan :
JDCC (Joint Defence Cooperation Committee)
8. RI-Pakistan :
DPD (Defence Policy Dialogue)
9. RI-Brunei :
JDCC (Joint Defence Cooperation Committee)
10. RI-Arab Saudi :
JMC (Joint Military Cooperation)

Untuk Promosi Industri Pertahanan dapat dilaksanakan melalui promosi dalam negeri yaitu pameran Indo Defence Expo & Forum, didalam pameran ini akan dihadiri oleh pejabat dari luar negeri setingkat Menhan, Wamenhan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Kapolri guna menghasilkan *Minutes of Understanding Kerjasama* kedua negara. Dalam pameran ini memamerkan alutsista antar negara yang bertujuan saling mempromosikan keunggulannya dan berharap adanya *Kerjasama Supply Chain, Joint Production, Joint Venture, Joint Development, Joint Investment, Transfer Of Technology (ToT), Overhaul, Refurbishment, Modification*.

Dalam kurun waktu tahun 2020 s.d 2021 dikarenakan adanya wabah pandemic pameran Indo Defence tidak dapat dilaksanakan dan baru terlaksana pada tanggal 2 s.d 5 November 2022.

Untuk promosi luar negeri yaitu dengan mengikuti pameran dengan negara luar negeri seperti, di Abu Dhabi (IDEX) tahun 2021



Kunjungan Dirjen Potan di Pameran IDEX Abu Dhabi

Dalam rangka pendampingan negara asing hanya Jepang yang berkunjung ke industri pertahanan Indonesia, sebagai berikut:





DI PT. BANDAR ABADI



DI PT. TERAFUK

6.4 Pelaksanaan Pameran Indo Defence

- a. Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) bekerja sama dengan PT. Napindo Media Ashatama menyelenggarakan Pameran Industri Pertahanan terbesar se-Asia Tenggara Indo Defence 2022 Expo & Forum yang digelar di tiga lokasi secara bersamaan, masing-masing di JIlexpo Kemayoran sebagai pusat aktivitas, kemudian di Pangkalan TNI AL Pondok Dayung dan Apron Selatan Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, mulai tanggal 2 s.d. 5 November 2022, dengan tema "*Peace, Prosperity, Strong Defence*".
- b. Pelaksanaan Indo Defence 2022 Expo & Forum bertujuan untuk membangun dasar-dasar yang kuat bagi terjalinnya interaksi antara industri pertahanan dalam negeri dengan luar negeri, serta terciptanya kerja sama dan *Transfer of Technology* (ToT) dalam bentuk *Joint Production* atau *Joint Development* serta merupakan wadah penajakan pasar dan potensi bisnis yang saling menguntungkan semua pihak.
- c. Dalam event ini juga diselenggarakan kegiatan Indo *Aerospace*, yang merupakan penyelenggaraan ke-7 sejak tahun 2008 dan Indo Marine ke-6 sejak diselenggarakan pertamakalipada tahun 2010. Selain itu juga dilaksanakan Forum Diskusi Pertahanan bertajuk Indo Defence Forum, Indo Marine Forum, MRO Forum, Space Summit dan Indo *Defence Forum* – *Land System* dengan menghadirkan pakar-pakar di bidang pertahanan sebagai narasumber.
- d. Penandatanganan beberapa MoU antara industri pertahanan Indonesia dengan negara lain merupakan bentuk kerjasama untuk meningkatkan standarisasi produk Alpalhankam agar mampu memenuhi kebutuhan teknologi yang dibutuhkan oleh pengguna dan dapat bersaing di pasar global (*Global suplay chain*) serta mempercepat kemandirian industri pertahanan.
- e. Beberapa capaian oleh industri pertahanan selama pelaksanaan Indo Defence 2022 Expo & Forum antara lain :
 1. Penandatanganan MoU : 52 MoU
 2. Penandatanganan Kontrak : 19 Kontrak
 3. Jumlah peserta : 905 Perusahaan dari 59 negara
 4. Jumlah delegasi : 211 Delegasi dari 33 negara
 5. Jumlah pengunjung : 36.806 Pengunjung
 6. Nilai bisnis selama pameran :
 - a. Nilai bisnis < 1 juta USD : 96 Perusahaan
 - b. Nilai bisnis 1-50 juta USD : 66 Perusahaan
 - c. Nilai bisnis 50 – 100 juta USD : 59 Perusahaan
 - d. Nilai bisnis > 100 juta USD : 46 Perusahaan
 7. Nilai bisnis 12 bulan setelah masa pameran :
 - a. Nilai bisnis < 1 juta USD : 66 Perusahaan
 - b. Nilai bisnis 1-50 juta USD : 89 Perusahaan
 - c. Nilai bisnis 50-100 juta USD : 60 Perusahaan
 - d. Nilai bisnis > 100 juta USD : 51 Perusahaan
 8. Pencapaian publikasi melalui 34 (tiga puluh empat) media pendukung.

FOTO KEGIATAN PAMERAN **INDO DEFENCE**





6.5

Perizinan Industri dan Badan Usaha Bahan Peledak (BU Handak)

Penekanan utama dalam perizinan BU handak adalah mendorong peningkatan dan penyerapan Handak produksi dalam negeri dan menurunkan impor dalam memenuhi kebutuhan industri pertambangan dan migas. Pembinaan BU Handak meliputi:

- a. Memberikan atau menolak rekomendasi dan/atau perizinan pendirian pabrik;
- b. Memberikan atau menolak permohonan Izin usaha produksi;
- c. Memberikan rekomendasi perluasan atau pengembangan pabrik;
- d. Memberikan atau menolak permohonan Izin usaha pengadaan melalui impor Bahan Peledak;
- e. Mengizinkan atau menolak permohonan Izin usaha pendistribusian Bahan Peledak;
- f. Memberikan atau menolak permohonan Izin usaha pergudangan;
- g. Memberikan atau menolak permohonan Izin jasa peledakan komersial;
- h. Memberikan atau menolak permohonan Izin usaha penelitian dan pengembangan;
- i. Menetapkan badan usaha sebagai Badan Usaha Bahan Peledak;
- j. Memberikan atau menolak permohonan perpanjangan Izin sebagai Badan Usaha Bahan Peledak;
- k. Mengabulkan atau menolak permohonan alokasi kuota Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori;



Rapat Tim Pengawasan Bahan Peledak Antar Kementerian/Lembaga

- l. Mengabulkan atau menolak permohonan rekomendasi penambahan alokasi kuota Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori;
- m. Mengabulkan atau menolak permohonan rekomendasi penunjukan sebagai Importir Tendaftar Nitro Celulosa (NC);
- n. Mengabulkan atau menolak permohonan rekomendasi penunjukan sebagai Importir Produsen Nitro Celulosa (NC);
- o. Memberikan atau menolak permohonan rekomendasi dan Izin ekspor Bahan Peledak;
- p. Mengabulkan atau menolak permohonan rekomendasi penunjukan sebagai importir kembang api; dan
- q. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

NO	BU HANDAK	ALAMAT	JENIS KEGIATAN USAHA	LOKASI PABRIK & GUDANG	NOMOR PERIZINAN
1	2	3	4	5	6
1.	PT. Dahana	Jalan Raya Subang Sukamurang KM 12, Cibogo Kab. Subang, Jawa Barat 41285	1. Produksi a. Ammonium Nitrate (semester 2 tahun 2023) b. DANF c. Catridge Emulsio d. Emulsion Bulk/Blend e. Shaped Charges f. Detonato g. Primer (Booster) h. Sumbu Api/ Ledak(Blasting Cord/ Detonating Cord/Fuse i. Propelan		
2.	PT. Pindad	Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 517 Bandung Jawa Barat	1. Produksi a. ANFO b. Detonator Elektrik c. Detonator Non Elektrik d. Detonator Elektronik e. Booster f. Cosat 1000 g. Emulsion Blend h. Emulsion Matrik 2. Pengadaan 3. Pergudangan 4. Pendistribusian 5. Jasa Peledakan		
3.	PT. Multi Nitrotama Kimia	Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot. 9 Jakarta 12190	1. Produksi a. Ammonium Nitrate b. Emulsi c. ANFO - ANSOL d. Perakitan Detonator e. Booster f. Pengadaan g. Pergudangan h. Pendistribusian i. Jasa Peledakan		

NO	BU HANDAK	ALAMAT	JENIS KEGIATAN USAHA	LOKASI PABRIK & GUDANG	NOMOR PERIZINAN
1	2	3	4	5	6
4.	PT. Armino Prima	Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240	1. Produksi (ANFO, ANSOL, Emulsion dilaksanakan di lapangan dengan peralatan khusus) 2. Pengadaan 3. Pergudangan 4. Pendistribusian 5. Jasa Peledakan		
5.	PT. Trifita Perkasa	Jalan Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160	1. Produksi (Detonator Non Elektrik & Detonator Elektronik rencana produksi semester 1 2023, ANFO/Emulsi) 2. Pengadaan 3. Pergudangan 4. Pendistribusian 5. Jasa Peledakan		
6.	PT. Asa Karya Multipratama	Grand Wijaya Center Blok C No. 18 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan	1. Produksi (Detonator Non Elektrik & Booster rencana produksi akhir 2023, ANFO dilaksanakan di lapangan dengan peralatan khusus) 2. Pengadaan 3. Pergudangan 4. Pendistribusian 5. Jasa Peledakan		
7.	PT. Mexis	Cytyloft Sudirman 15th Floor Suite 15-11 Jalan KH. Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat 14250	1. Produksi (Booster & Dinamit rencana produksi akhir 2023, Emulsion dilaksanakan di lapangan dengan peralatan khusus) 2. Pengadaan 3. Pergudangan 4. Pendistribusian 5. Jasa Peledakan		
8.	PT. Aneka Gas Industri	Ged. UGM Samator Pendidikan Tower A5-6 Jalan Sahrdjo No. 83 Jakarta 12850	1. Pengadaan (khusus Amonium Nitrat Medical Grade) 2. Pergudangan 3. Pendistribusian		
9.	PT. Distribusi Ammo Nusantara	Alamanda Tower 24th Floor Unit E Jalan TB. Simatupang Kav. 23-24 Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430	1. Pengadaan dalam negeri 2. Pergudangan 3. Pendistribusian		

NO	BU HANDAK	ALAMAT	JENIS KEGIATAN USAHA	LOKASI PABRIK & GUDANG	NOMOR PERIZINAN
1	2	3	4	5	6
10.	PT. Prima Mega Blast	Jalan Kirana Efenue II Blok C-2 No.11 Pegangsaan II Kelapa Gading Jakut14250	1. Pengadaan dalam negeri 2. Pergudangan 3. endistribusian		
11.	PT. Kaltim Nitrate Indonesia	Pondok Indah Office Tower II Jalan Sutan Iskandar Muda Kav. V Jaksel 12310	• Produksi Ammonium Nitrate		

Pengawasan BU handak yang dilakukan meliputi:

1. Pengawasan rutin dilakukan:
 - b. Survei ke rencana lokasi pendirian pabrik bahan baku bahan peledak;
 - c. Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap bulan terkait kegiatan usaha yang dilaporkan kepada Menhan dengan tembusan Dirjen Potan Kemhan. Materi Muatan laporan:
 - 1) Nama Perseroan Terbatas/Persero;
 - 2) Perkembangan pendirian pabrik;
 - 3) Kapasitas pabrik bahan peledak;
 - 4) Kapasitas gudang bahan peledak; dan
 - 5) Waktu pelaksanaan pendirian pabrik bahan peledak.

2. Pengawasan insidental, dilakukan berdasarkan kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan pelaksanaan kewajiban perizinan berusaha.

Kemhan juga menetapkan kuota handak sebagai pedoman untuk produksi, ekspor dan import oleh Badan Usaha Handak dan Industri handak. Proses perhitungan penentuan kuota handak ditetapkan oleh Menhan atas usulan Dirjen Potan Kemhan melalui rapat antar kementerian. Data dikumpulkan dari para BU handak meliputi, realisasi Badan usaha, Total realisasi badan usaha, dan alokasi dalam negeri. Besaran Kuota ditentukan oleh realisasi badan usaha dibagi total realisasi dikalikan dengan alokasi dalam negeri.



BADAN USAHA	JENIS KEGIATAN	NOMOR KEP	MASA BERLAKU
PT Dahana (Persero)	   	KEP/1572/M/XII/2017	6 Sep 2017 – 16 Des 2019
PT PINAD (Persero)	    	KEP/2036/M/XII/2017	8 Des 2017 – 8 Des 2019
PT Multi Nitrolama Kimia (MNK)	    	KEP/2037/M/XII/2017	8 Des 2017 – 8 Des 2019
PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI)		KEP/274/M/V/2011	15 Apr 2011 – 15 Apr 2021
PT Armino Prima	    	KEP/1697/M/XII/2017	29 Nov 2017 – 20 Des 2019

BADAN USAHA	JENIS KEGIATAN	NOMOR KEP	MASA BERLAKU
PT Trifita Perkasa	    	KEP/1050/M/X/2016	19 Okt 2015 – 19 Okt 2018
PT Asa Karya Multipratama	    	KEP/946/M/IX/2016	21 Sep 2016 – 19 Sep 2018
PT Aneka Gas Industri (AGI)		KEP/285/M/II/2016	22 Mar 2016 – 22 Mar 2018
PT Tridaya Esta (TDE)	    	KEP/929/M/IV/2017	13 Apr 2017 – 13 Apr 2019
PT Maxis	    	KEP/1025/M/V/2017	8 Mei 2017 – 24 Mei 2019
PT Distribusi Amnno Nusantara (DAN)	    	KEP/587/M/VI/2017	10 Jun 2016 – 10 Jun 2018
Prima Mega Blast (PMB)	 	KEP/1392/M/XII/2016	27 Des 2016 – 23 Des 2018

6.6 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan (Bangtekindhan).

Pada tahun 2015 pemerintah membuat kebijakan alokasi anggaran Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan (Bangtekindhan) sebagai insentif yang diberikan kepada Industri Pertahanan untuk mengembangkan teknologi Industri Pertahanan melalui pembuatan First Article (FA), hal ini sesuai dengan Permenhan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Program Bangtekindhan.

Tujuan Program Bangtekindhan adalah untuk:

1. Menindaklanjuti Prototipe terseleksi hasil penelitian pengembangan menjadi produk yang siap diproduksi (First Article) oleh Industri Pertahanan untuk menghasilkan Alpalhankam;
2. Mengembangkan suatu produk Alpalhankam melalui Rekayasa Ulang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan/atau perkembangan teknologi; dan
3. Mewadahi atau menindaklanjuti kerja sama pengembangan dan/atau produksi Industri Pertahanan baik antar Industri Pertahanan dalam negeri maupun dengan Industri Pertahanan luar negeri.

Sasaran Program Bangtekindhan:

1. Membangun kemampuan Industri Pertahanan melalui penguasaan teknologi canggih di bidang

Alpalhankam guna memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan;

2. Mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan dalam memproduksi Alpalhankam sesuai dengan persyaratan operasional (operational requirement) dan spesifikasi teknik pengguna; dan
3. Sebagai bentuk insentif bagi Industri Pertahanan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam penguasaan teknologi.

First Article diseleksi dari beberapa prototipe yang sudah dihasilkan oleh Balitbang Kemhan RI dan Dislitbang Angkatan. Pada tahun 2016-2019 telah dihasilkan 33 FA (12 FA Matra Darat, 12 Matra Laut dan 9 FA Matra Udara). Pada TA. 2020 s.d. TA. 2022 telah dilakukan penyerahan produk FA kepada user dengan rincian sebagai berikut:

- a. TNI AD sejumlah 7 materiil FA.
- b. TNI AL sejumlah 8 materiil FA.
- c. TNI AU sejumlah 6 materiil FA.
- d. 2 materiil FA dalam proses Penghapusan.

Sampai dengan saat ini ada 5 FA yang telah diproduksi massal, yaitu:

1. FA. *Swamp Boat* (PT. Mega Perkasa)
2. FA. *Senjata Doppler* (PT. Pindad)
3. FA. *Card Module Radar Thomson 2017* (PT. Eka Bina Sarana)

4. A. *Remote Control Weapon System* (PT. Respati)
5. FA. *Card Module Radar Thomson 2019* (PT. Eka Bina Sarana)

Program Pemberdayaan Industri Pertahanan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan melalui Dit Tekindhan Ditjen Potan Kemhan melaksanakan penelitian dan pengembangan Industri dan Teknologi Pertahanan guna mendorong dan memajukan pertumbuhan Industri Pertahanan melalui Program Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan (Program Binpottekindhan). Program Binpottekindhan itu berupa *Mission System* PTTA Klas MALE, *Reverse Engineering System Rudal* dan *Tank Boat*.

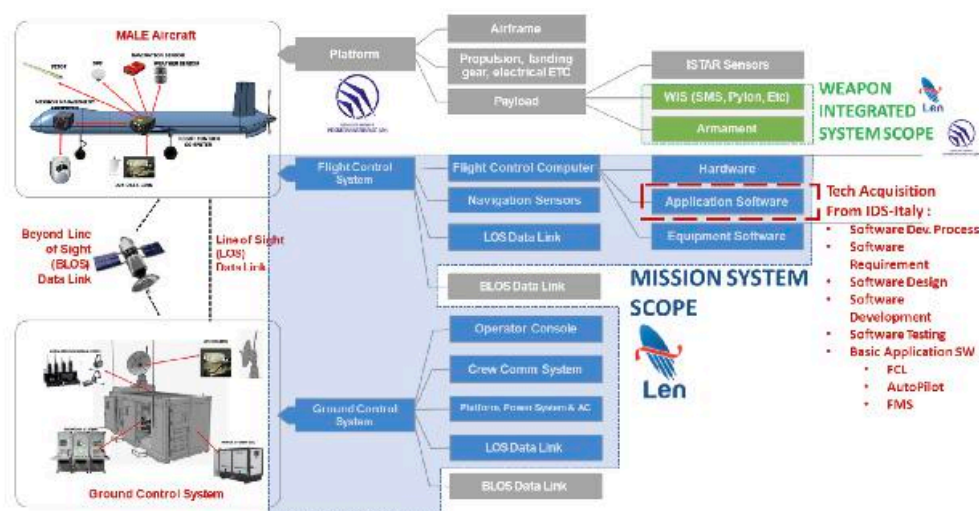
1. Mission System PTTA Klas MALE.

Program Pengembangan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Medium Altitude Long Endurance (MALE) dilaksanakan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga melalui Konsorsium yang terdiri dari Kemhan (Ditjen Potan dan Balitbang), TNI AU, BPPT, LAPAN, ITB, PTDI dan PT Len Industri. Hal tersebut sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Pertahanan, TNI AU, BPPT, ITB, PTDI dan PT. Len Industri (Persero) Nomor: PKS/114/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Perekayasaan dan Pengembangan Pesawat

Terbang Tanpa Awak (PTTA) Medium Altitude Long Endurance (MALE) dalam mendukung pemenuhan produk Alpalhan dan kesiapan Industri Pertahanan.

Program Pengembangan PTTA MALE Kombatan ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres RI Nomor 109 tahun 2020 dan merupakan arah pembangunan teknologi pertahanan berdasarkan Perpres RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. Rencana pengembangan PTTA MALE sesuai PKS, sebagai berikut :

- a. Pengembangan Platform (Wahana/Airframe) dilaksanakan oleh BPPT bersama PT Dirgantara Indonesia untuk memproduksi PTTA MALE (EH-1, EH-1B, EH-2, EH-3, EH-4 dan EH-5).
- b. Pengembangan *Mission System* dilaksanakan oleh Ditjen Potan Kemhan bersama PT Len Industri (Persero) yang digunakan di PTTA MALE EH-4.
- c. Pengembangan *Weapon System* dilaksanakan oleh Balitbang Kemhan bersama PTDI dan PT Len Industri (Persero) yang digunakan di PTTA MALE EH-5.
- d. Pengembangan Data Link dilaksanakan oleh LAPAN.
- e. *Lead Integrator program* adalah PT Dirgantara Indonesia.
- f. *Requirement validation* dilaksanakan oleh TNI AU.



Ditjen Potan Kemhan bersama PT. Len Industri (Persero) telah melaksanakan pengembangan Mission System PTTA Klas MALE dimulai tahun 2019 s.d. 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Kebutuhan Anggaran	Output	Pekerjaan
1	2019	29,036	29,036	<i>Flight Control Computer (FCC) dan Ground Control Console (GCC).</i>
2	2020	29,679	29,679	<i>Basic Flight Control Software dan Ground Control Station.</i>
3	2021	15,99	15,99	<i>Certification Support, System Requirement Validation, Test Requirement dan Technology Acquisition.</i>
4	2022	15,00	5,219	<i>EH1-B Data Alignment, GCS Upgrade Design System, dan On Board Test Bench for Proof of Concept.</i>
5	2023	15,00		<i>EH5 (ISTAR Combat) Design & Production, Weapon Integration System, Structure Test, Integration & Test, Alignment Requirement Test Based On EH2 & EH3, Navigation Sensors Requirement, DataLink Requirement, Application Software (advance & Combat), dan Equipment Software Development.</i>
6	2024	55,00		<i>EH5 (ISTAR Combat) Design & Production, Weapon Integration System, Integration & Test, Alignment Requirement Test Based On EH2 & EH3, FCC Procurement, Navigation Sensors Procurement, Test Flight EH2, Certification EH2, Datalink Procurement, Application Software (advance & Combat) dan GCS Console Development & Production (Advance).</i>
7	2025	50,00		<i>ISTAR Aircraft Integration, ISTAR Laboratory Test, Test Flight EH5, APSW Development to FCC, Subsystem Integration Navigation, Subsystem Integration Datalink dan Subsystem Integration Equipment Software.</i>
8	2026	15,00		<i>Test Flight EH4 dan Type Certificate</i>

Output Pengembangan Mission System
PTTA Klas MALE dari TA. 2019 s.d. 2021:

	2019	2020	2021
On Board	 Flight Control Computer (FCC)	 Basic Flight Control Software	 AP5W Simulation Test
On Ground	 Ground Control Console (GCC)	 Ground Control Station (GCS)	
On Workshop	 Hardware in the Loop Simulation (HLS)  ISTAR Requirements Documents	 ISTAR Design Document  UCAV Requirement and Design Document	 Certification Plan Test Procedure Test Requirement

Dengan dibentuknya organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN yang terdiri dari 5 entitas/lembaga yang terdiri dari Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN berpengaruh terhadap Program konsorsium PTTA MALE dan sesuai surat Kepala BRIN kepada Sekjen Kemhan Nomor:B-387/II/MR/11/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Penjelasan Tindaklanjut Program PTTA MALE Kombatan, kebijakan BRIN dalam Program PTTA MALE Kombatan, sebagai berikut:

- Platform (EH-1B) yang sudah dilakukan uji terbang untuk dimaksimalkan menjadi output yang bisa dimanfaatkan bagi kebutuhan Sipil/Non Pertahanan (hujan buatan, kebakaran hutan dll).
- Pada Pengembangan dengan kebutuhan Militer, pada prinsipnya BRIN siap mendukung dengan lead berada pada Kementerian Pertahanan.
- Kebijakan Rumah Program pada OR Penerbangan dan Antariksa difokuskan pada Penerbangan dan Antariksa Sipil.

Pelaksanaan Development Flight/First Flight PTTA MALE EH-1B menggunakan *Mission System* yang sudah proven buatan Magline, Spanyol, sehingga tidak ada keterlibatan *Mission System* pengembangan PT Len Industri pada kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut merupakan wahana proof of concept (*Airframe*) yang dilakukan melalui

kontrak antara BPPT dan PTDI, sehingga Platform EH-1B tidak ada keterkaitan dengan Ditjen Potan Kemhan.

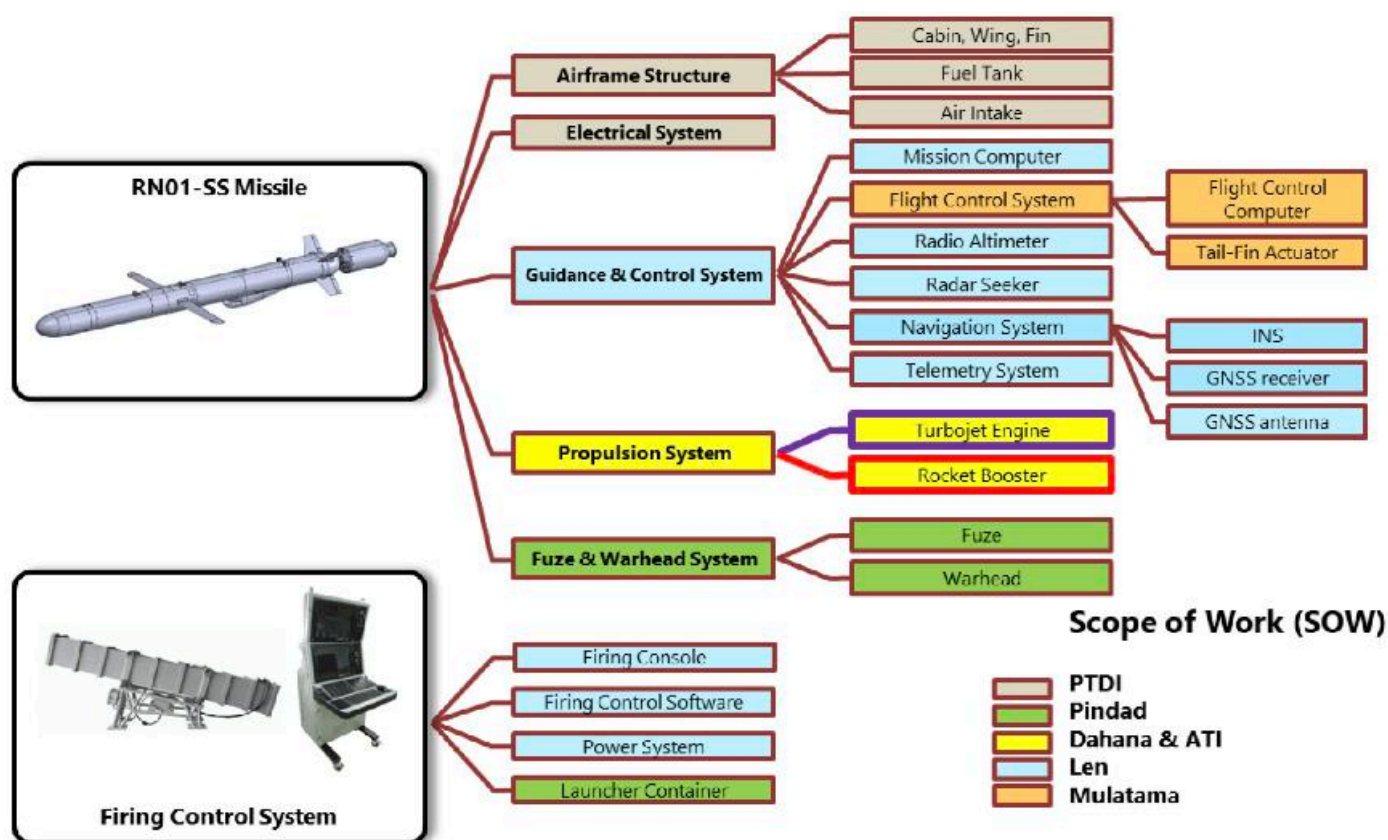
Terkait revisi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Pertahanan RI, TNI AU, BPPT, ITB, PTDI, dan PT. Len Nomor: PKS/114/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Perekrayaan dan pengembangan PTTA MALE dalam mendukung pemenuhan produk Alpalhankam dan kesiapan Indhan yang akan berakhir tanggal 21 Agustus 2022. Kemhan telah membuat Surat ke BRIN Nomor: B/622/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Kelanjutan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengembangan PTTA MALE Kombatan dan sudah dijawab oleh BRIN sesuai surat Sekretaris Utama BRIN Nomor: B-3818/II.2/KS.00.00/4/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Kelanjutan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan PTTA MALE Kombatan yang isi suratnya pihak BRIN menerima dengan baik rencana keberlanjutan Kerja Sama tentang Perekrayaan dan Pengembangan PTTA MALE dalam mendukung pemenuhan produk Alpalhan dan Kesiapan Industri Pertahanan.

Dengan dibentuknya organisasi BRIN menyebabkan perubahan peran organisasi Lapan dan BPPT yang berpengaruh terhadap Program Konsorsium PTTA MALE. Terkait hal tersebut perlu menata ulang organisasi Konsorsium PTTA MALE yang fleksibel sesuai tugas masing-masing dari anggota Konsorsium PTTA MALE sekaligus revisi PKS.

2. Pengembangan Rudal Nasional

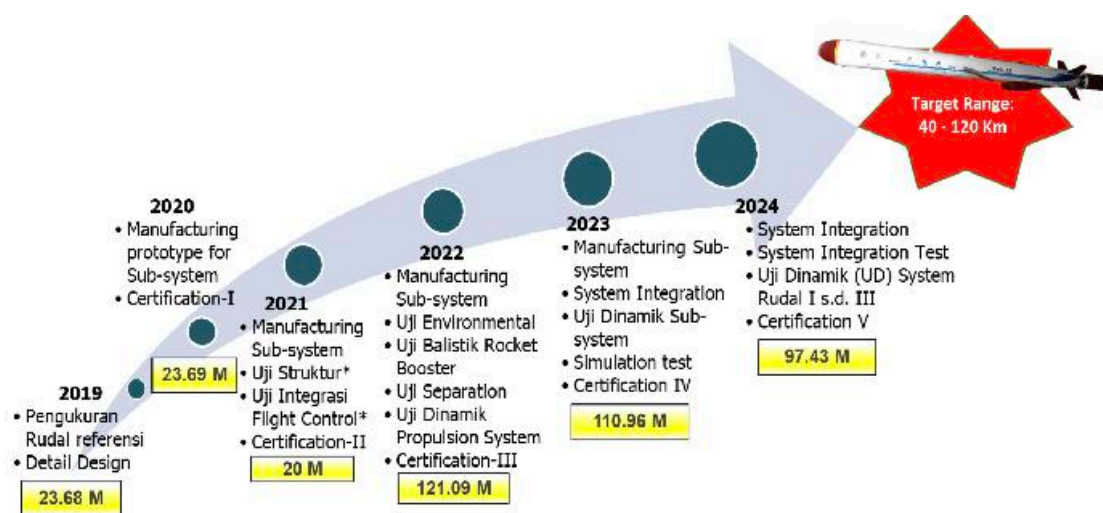
Program Pengembangan Sistem Rudal Nasional merupakan pengembangan Sistem Rudal dengan referensi Rudal C-705 yang digunakan oleh TNI AL. Rudal ini merupakan *surface to surface* yang diaplikasikan ke kapal perang, dimana spesifikasi teknis Rudal Nasional yang dikembangkan oleh konsorsium Rudal telah mendapat persetujuan dari Kasal berdasarkan surat Kasal Nomor : B/1633/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020. Pengembangan ini melibatkan industri pertahanan dimana sebagai Lead Integrator adalah PTDI berdasarkan Keputusan KKIP Nomor : KEP/04/KKIP/IV/2014 tanggal 30 April 2014, dengan anggota konsorsium berdasarkan Surat Perintah Dirjen Potan Kemhan Nomor : SPRINT/265/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 dengan anggota PT. Pindad, PT. Len Industri, PT. Dahana, PT Aero Terra Indonesia dan PT. Mulatama, dengan pengembangan system sebagai berikut :

- PTDI pengembangan Airframe Structure dan Electrical System
- PT Len Industri pengembangan *Guidance Control System* meliputi *Mission Computer, Radio Altimeter, Radar Seeker* dan *Telemetry System*
- PT Dahana dan PT Aero Terra Indonesia pengembangan *Propulsion System* meliputi *Jet Engine* dan *Rocket Booster*
- PT Pindad pengembangan Fuze dan Warhead System
- PT Mulatama pengembangan *Flight Control System*.



Rencana pengembangan Rudal Nasional ini telah mendapatkan keputusan Menhan Nomor : KEP/435/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Rudal Nasional. Dimana Program TA. 2022 telah memasuki tahap/fase ke 4 dari 6 tahapan/fase yang direncanakan sampai dengan TA. 2024. Pengembangan Sistem Rudal Nasional ini membutuhkan Anggaran sebesar 396,85 M dengan target range 40 – 120 Km dengan rincian 6 tahapan/fase sebagai berikut:

No	Tahun	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Kegiatan	Tahapan	Ket
1	2	3	4	5	6
1	2019	23,68	23,68	<i>Detail design.</i>	
2	2020	23,69	23,69	<i>Manufacturing prototipe for sub system dan certification I.</i>	
3	2021	20,00	17,02	<i>Manufacturing sub system, uji struktur dan certification II.</i>	Uji struktur dilaksanakan 2022
4	2022	116,09	20,00	Uji balistik roket boster, separation, manufacturing sub system, uji environmental, uji dinamik propulsion system dan certification III.	Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan
5	2023	110,96		<i>Manufacturing sub system, system integration, uji dinamik sub system, simulation test dan certification IV.</i>	
6	2024	97,43		<i>System integration, system integration test, uji dinamik system rudal I s.d. III dan certification V (TC Issuance)</i>	



Dimana untuk TA. 2022 sesuai dengan *Roadmap* Pengembangan Sistem Rudal Nasional membutuhkan anggaran Rp. 121,09 milyar tidak terdukung penuh, namun terdukung Rp. 20 milyar sehingga capaian dari konsorsium tidak sesuai dengan *Roadmap* Pengembangan Sistem Rudal Nasional. Terkait dengan hal tersebut Konsorsium Rudal Nasional akan merevisi *Roadmap* tersebut.

3. Pengembangan Tank Boat

Program Binpottekindhan Tank Boat dirancang untuk memerangi Gerombolan Separatis dan tugas-tugas pasukan di perbatasan serta tugas pertahanan di wilayah perairan. Berangkat dari wacana tersebut PT Pindad dan PT Lundin Industry Invest ditunjuk untuk merealisasikan dengan bekerjasama dengan CMI Defence untuk persenjataan serta menggandeng industri pertahanan lainnya, untuk membentuk konsorsium *Tank Boat*, terdiri dari PT Pindad (*lead integrator*), PT Lundin Industry Invest, PT Len Industri dan PT Harrif Daya Tunggal Engineering.

Kegiatan pengembangan *Tank Boat* dimulai tahun 2016 dengan pembuatan *mock up* yang ditampilkan pada pameran Indo Defence 2016. Selanjutnya di tahun 2017 dilaksanakan kajian teknis *Tank Boat*

oleh TNI AD dan berlanjut pada tahun 2018 dengan finalisasi teknis dan pembuatan *basic design* serta uji *design*. Pada TA. 2019 pembuatan *Plug* dan cetakan *Moulding Tank Boat* oleh PT Pindad dan PT Lundin, yang dilanjutkan TA. 2020 pemasangan subsistem kapal serta pengintegrasian dalam *Tank Boat*. Di TA. 2021 dilaksanakan uji dan sertifikasi oleh Puslaik Kemhan dengan hasil terbitnya *Certificate Type* Nomor TC/02/VI/TANK BOAT/2021 tanggal 3 Juni 2021, dengan spesifikasi teknis *type Catamaran* dengan kecepatan maksimal 40 knot serta daya angkut pasukan 60 personel serta dilengkapi RCWS persenjataan kaliber 30 mm. Total dukungan anggaran dimulai TA. 2018 sampai dengan 2020 sebesar Rp. 129.849.183.000,-



Kunjungan Dirjen Pothan Kerja ke PT. Lundin

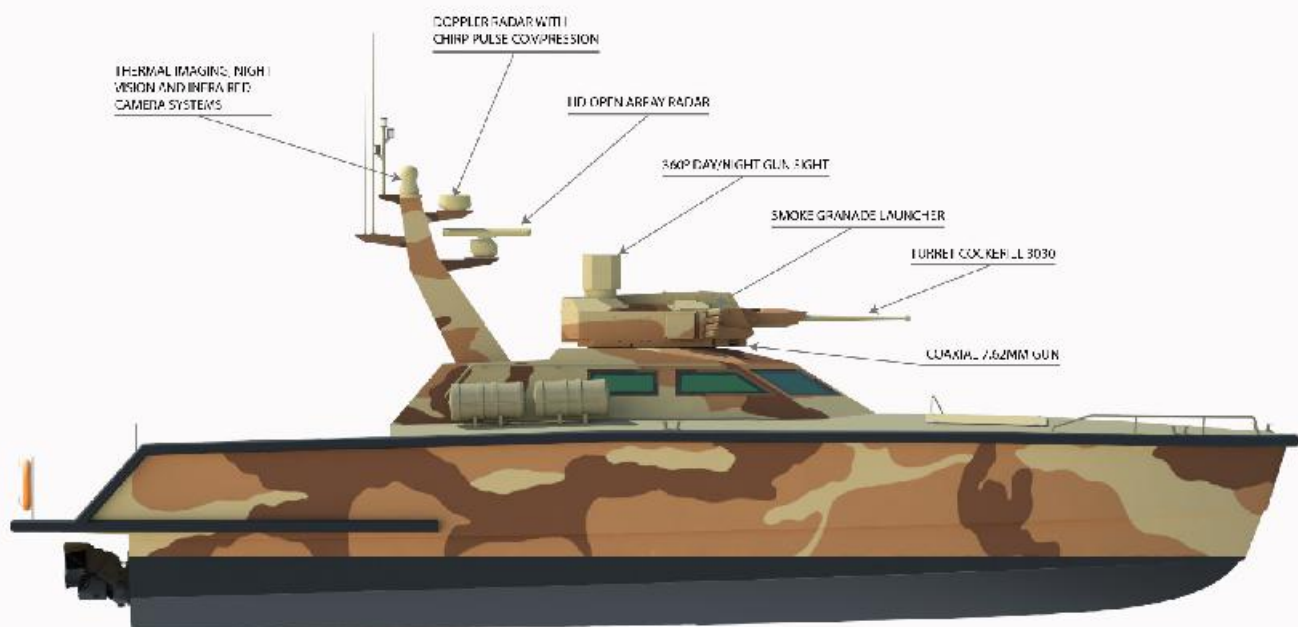


Kunjungan Dirjen Potan Kerja ke PT. Lundin





TANK BOAT **ANTASENA** APC 30



Penutup

Ditjen Potan Kemhan selama periode 2020-2022 telah melaksanakan berbagai program untuk memastikan kesiapan potensi pertahanan untuk ditransformasikan menjadi kekuatan nyata pertahanan. Setditjen telah mengawal seluruh proses administrasi sehingga serapan anggaran di tahun 2022 mencapai 99,40 %.

Memberikan layanan terbaik untuk Veteran, salah satu terobosan adalah meluncurkan Aplikasi Veteran berbasis Android, yang dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran Calon Veteran RI. Terobosan lain adalah penyederhanaan proses administrasi pendaftaran Calon Veteran RI dari 3 tahap menjadi 1 tahap dengan istilah lain Program *Three In One*. UU No. 23 Tahun 2019 menjadi tonggak sejarah baru dalam hal Pertahanan negara, yaitu dari Tahun 2021- 2022 telah menetapkan sebanyak 6.076 anggota Komponen Cadangan serta berhasil membentuk Komponen Pendukung Kesehatan sebanyak 679 orang yang menjadi relawan dalam penanganan Covid-19 di RS. dr. Suyoto.

Sosialisasi dan internalisasi Bela Negara baik di lingkup Pendidikan, lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan, serta dibangunnya studio ngopi daring Bela Negara sebagai tempat pengembangan konten kreatif dalam rangka Bela Negara di era milenial sekarang ini.

Bidang Teknologi dan Industri Pertahanan (Dittekindhan) mencatat prestasi baru dalam layanan pendaftaran dan penetapan industri pertahanan di tahun 2020 dengan Sistem Online untuk Pendaftaran Industri Pertahanan, Ekspor dan Impor Alpalhankam serta Badan Usaha Bahan Peledak. Sistem Online tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan. Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) bekerja sama dengan PT. Napindo Media Ashatama berhasil menyelenggarakan Pameran Industri Pertahanan terbesar se-Asia Tenggara *Indo Defence 2022 Expo & Forum* dengan tema "*Peace, Prosperity, Strong Defence*" dengan capaian antara lain:

1. Penandatanganan MoU : 52 MoU
2. Penandatanganan Kontrak : 19 Kontrak
3. Jumlah peserta : 905 Perusahaan dari 59 negara
4. Jumlah delegasi : 211 Delegasi dari 33 negara
5. Jumlah pengunjung : 36.806 Pengunjung
6. Nilai bisnis selama pameran :
 - a. Nilai bisnis < 1 juta USD : 96 Perusahaan
 - b. Nilai bisnis 1-50 juta USD : 66 Perusahaan
 - c. Nilai bisnis 50 – 100 juta USD : 59 Perusahaan
 - d. Nilai bisnis > 100 juta USD : 46 Perusahaan
7. Nilai bisnis 12 bulan setelah masa pameran:
 - a. Nilai bisnis < 1 juta USD : 66 Perusahaan
 - b. Nilai bisnis 1-50 juta USD : 89 Perusahaan
 - c. Nilai bisnis 50-100 juta USD : 60 Perusahaan
 - d. Nilai bisnis > 100 juta USD : 51 Perusahaan
8. Pencapaian publikasi melalui 34 (tiga puluh empat) media pendukung.



LAPORAN TAHUNAN
**DIREKTORAT JENDERAL
POTENSI PERTAHANAN**
KEMENTERIAN PERTAHANAN
TA 2022





DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN

